

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



kph
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan

**DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

JAKARTA, JANUARI 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Publik, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2019.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II adalah sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, satker juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan,

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4079/MenLHK-Setjen/Peg/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penataan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan akhir bulan Desember 2019 jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 85 orang PNS (2 orang diperbantukan di Lembaga *Forest Investment Program*). Selain itu juga terdapat 14 orang Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2019

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	-	-	-	-	1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	4	12		-	1	17
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	2	9		-	-	11
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	1	14	-	-	1	16
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	4	9	-	-	4	17
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	2	21	1	-	-	24
7.	Sub Bagian Tata Usaha	-	5	0	-	8	13
Total		14	70	1		14	99

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d. 31 Desember 2019

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1				1		1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	1	3	8	3	1	16	6	10
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan		4	4	1	2	11	10	1
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		6	7		2	15	9	6
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH		7	5	1		13	7	6
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi		5	16	3		24	9	15
7.	Sub Bagian Tata Usaha			3		2	5	2	3
Total		1	26	43	8	7	85	43	42

Ket : Jumlah Pegawai Tanpa Tenaga Kontrak

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan pada kolom di bawah ini:

Kekuatan :	Kelemahan :
<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi antar subdit yang memadai- Tersedianya dokumen RKTN- Tersedianya sistem informasi untuk mendorong pemegang izin melaporkan kegiatan dan pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan secara online- Tersedianya Perdirjen PKTL tentang penyelenggaraan Sinpasdok KPH- Penyelenggaraan Sinpasdok KPH dengan berbagi peran, tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat	<ul style="list-style-type: none">- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai- Terbatasnya SDM baik dari jumlah maupun keahlian- Kurangnya dukungan Anggaran- Kurang tersedianya ruangan yang nyaman untuk bekerja, salah satunya adalah buruknya kondisi AC sentral KLHK di ruangan yang mengganggu kesehatan pegawai)- Tumpang tindih peraturan di bidang kehutanan- Belum ada penyesuaian aturan penatausahaan PNBP-PKH dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan yang baru

Peluang :	Tantangan/Ancaman :
<ul style="list-style-type: none">- Isu mengenai agraria pada kawasan hutan- Terjalannya koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga (K/L) sehingga memudahkan informasi- Peran kelembagaan Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">- Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam Kawasan Hutan secara Non Prosedural- Maraknya yudisial review atas peraturan di Bidang Kehutanan- Perbedaan persepsi antara instansi pemerintah mengenai

Peluang :	Tantangan/Ancaman :
<p>Hutan sangat strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjalannya koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia - Sinpasdok KPH dijadikan Acuan data nasional KPH untuk perencanaan pembangunan KPH oleh Bappenas dan Birocan KLHK - Adanya kebutuhan wadah komunikasi data, informasi dan berbagi pengalaman sebagai pembelajaran dalam pengelolaan KPH - Duplikasi data KPH antar eselon 1 - Terdapat dana PNBK –PKH yang belum pernah digunakan - Ketersediaan geodatabase IPPKH yang komprehensif 	<p>kawasan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada penghargaan bagi walidata Sinpasdok KPH yang berprestasi - Resistensi dari unit kerja lain yang membangun sistem informasi KPH - Pemahaman unit kerja dapat bersinergi membangun sistem informasi KPH yang komprehensif dan berkualitas menjawab kebutuhan pengguna - Ada beberapa wajib bayar PNBK-PKH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBK-PKH belum diproses tindak lanjut pengakhiran IPPKH-nya - Berdasarkan UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBK ada tugas baru KLHK (PKTL,RPP, Subdit Infodok) terkait pemberian rekomendasi penundaan dan pengangsuran pembayaran PNBK-PKH yang dimohon oleh wajib bayar yang mana sebelumnya merupakan kewenangan Kemenkeu - KSP untuk IPPKH, terdapat beberapan dokumen tatabatas yang belum dapat ditemukan dan masih terdapat tatabatas yang menggunakan koordinat lokal yang sulit untuk dilacak.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mempercepat pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi Sumber Daya Hutan, penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur;
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS daya dukung daya tampung, service pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa kegiatan, yang mana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat dicapai oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi;

2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi dan Air dengan Layanan Minimal 80%.

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituang dalam Renstra Direktorat Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Penyusunan dan update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Prov	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)	34 Prov (update)
		Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 Provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	92KPH(409 KPH)	- (409 KPH)
		Pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya pengendalian prakondisi pembangunan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (409 KPH)	- (409 KPH)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Pengendalian perencanaan makro kawasan hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	34 Prov KPH (600 KPH)	- (600 KPH)
	Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terpantauya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	34 Prov	

Tabel 3 Lanjt. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				2015	2016	2017	2018	2019
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	142 KPH (600 KPH)	(600 KPH update)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	100%	100%	100%	100%	100%
	Regulasi Penataan Ruang Kawasan Hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	-	50%	100%	-	-
Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 100%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian penggunaan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%	Terselenggaranya verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan 80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersedianya sistem informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi, pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	3 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa				4 provinsi	4 provinsi
Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Jumlah KPH yang mempunyai kemampuan RPHJP	Fasilitasi Penyusunan RPHJP (Coaching klinik Penyusunan RPHJP)	Terlaksananya (Coaching klinik RPHJP)					15 Provinsi

B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahun keempat Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019. Adapun Rencana Kerja kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 ditampilkan pada table di bawah ini :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)
1.	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	409 KPH (update)
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan
2.	Pembentukan Unit KPH Serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi
		Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH (Update)
		Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan KPH	4 Provinsi
3.	Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 % (300 permohonan)
4.	Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPB	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPB	3 Dokumen
		Layanan Internal organisasi	1 Layanan
5	Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov
6	Terfasiltasinya penyusunan RPHJP KPH	Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP	15 Prov
7	Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPB sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat	1 Layanan

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2019 pada **Lampiran 1**.

C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah, 34 Prov	Jumlah KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH (Update)

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah, 34 Prov	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
Tersedianya data areal perhutanan sosial wilayah Jawa	Data areal perhutanan sosial wilayah Jawa	4 Provinsi
Layanan Internal Organisasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya	1 Kegiatan
Layanan Perkantoran	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	1 Layanan
	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor Dit RPP	

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlayannya permohonan penggunaan kawana hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase Permohonan penggunaan kawasan hutan memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku (300 permohonan)	100%

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersedianya Peta Penetapan dan kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki Peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah, 34 Prov	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov
Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan KPH	4 Provinsi
	Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP	15 Prov

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Verifikasi dan pemantauan pembayaran PNBK Penggunaan kawasan hutan	Verifikasi Dan Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan Minimal	80%
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen

D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Rencana, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dan Renja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, Renstra Tahun 2015-2019 dan Renja Tahun 2019 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan dokumen

lainnya. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon III dan IV). Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 telah disetujui pada tanggal 5 Desember 2018, dengan total anggaran DIPA Revisi 5 (tanggal 19 Desember 2019) sebesar Rp. 49.242.011.000,- yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.9.030.186.000,- dan dana Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 40.211.825.000,-. Dana HLN ini merupakan hibah dari *Forest Investment Program (FIP) Proyek II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"* yaitu kerjasama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan *World Bank* dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 rata-rata tercapai 100% untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Capaian IKK Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	409 KPH (Update)	420 KPH (update)	102
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	1 Laporan	100
Pembentukan Unit KPH Serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov	34 Prov	100
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Prov	34 Prov	100
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH (Update)	390	65
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan KPH	4 Prov	4 Prov	100
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 %	100%	100
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPH	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPH	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	1 Layanan	100
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov	4 Prov	100
Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Fasilitasi penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	15 Prov	15 Pov	100
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin	1 Layanan	1 Layanan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	kinerja yang optimal			

b. Efektifitas Capaian Kinerja

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pada tahun 2019 juga mempunyai capaian kinerja sebesar rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2019	Efektifitas Capaian Kinerja
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	93,47	102	1,09
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	100	100	1,00
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	100	100	1,00
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100	100	1,00
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	94,11	65	0,69
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH	0	100	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2019	Efektifitas Capaian Kinerja
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100	100	1,00
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWP	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWP	100	100	1,00
	Layanan Internal organisasi	100	100	1,00
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	100	100	1,00
Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Fasilitasi penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	0	100	-
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	100	100	1,00

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2019	% Capaian Keuangan Tahun 2019	Efisiensi Capaian Kinerja
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	100	99,91	1,00
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	88,04	73,96	1,19
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	100	99,91	1,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2019	% Capaian Keuangan Tahun 2019	Efisiensi Capaian Kinerja
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100	93,27	1,07
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK	100	99,69	1,00
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan KPH	100	99,87	1,00
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100	98,87	1,01
Tersedianya data dan informasi spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPB	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPB	100	98,35	1,01
	Layanan Internal organisasi	100	97,09	1,02
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	100	95,93	1,04
Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Fasilitasi penyusunan RPHJP KPH (Coanching Klinik Penyusunan RPHJP)	100	99,87	1,00
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPB sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	100	95,30	1,04

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang

menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1.

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI					Total Realisasi s.d Tahun 2019	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2015	2016	2017	2018	2019		
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH	114 KPH	100 KPH	100 KPH	86 KPH	20 KPH	420 KPH Update	102,68
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	3 Laporan	-		1	1	1	3	100
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Prov	34 Prov	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	100
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	600 KPH (34 Prov)	265 KPH	336 KPH	208 KPH	108 KPH	-	652 KPH	108,67
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTTP dan RKTG	600 KPH (34 Prov)	185 KPH (185 KPH)	20 KPH (205 KPH)	127 KPH (332 KPH)	58 KPH (390 KPH)	390 KPH	390 KPH	65
Terlayannya permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Khususnya Dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinya sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Tersedianya data dan informasi	Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan	15 Judul	3 judul	3 judul	3 judul	3 judul	3 judul	15 judul	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI					Total Realisasi s.d Tahun 2019	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2015	2016	2017	2018	2019		
spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Hutan PKH dan PWPH	ruang kawasan hutan ,PKH dan PWPH								
	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	1	1	1	1	1	1	100
Dukungan Manajemen Kegiatan RPPWPH sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dgn nilai minimal 78, 00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100
Tersedianya Data Areal perhutanan sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Prov				4 Prov	4 Prov	4 Prov	100

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahun berjalan di bandingkan dengan tahun sebelumnya :

Tahun 2015 : 109 KPH

Tahun 2016 : 100 KPH

Tahun 2017 : 100 KPH

Tahun 2018 : 86 KPH

Sampai dengan tahun 2018, sudah tercapai 400 KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH dari total target sebanyak 409 KPH. Jadi masih ada 9 KPH lagi yang belum ditetapkan. Tetapi di tahun 2019 ini Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah yang seyogyanya menetapkan 9 unit KPH justru menetapkan sebanyak 20 unit KPH (melebihi target). Adanya perubahan jumlah total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi.

Pembentukan wilayah KPH melalui tahapan :

1. Rancang bangun KPH disusun oleh Gubernur yang merupakan Peta deliniasi wilayah KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH yang selanjutnya di usulkan kepada menteri.
2. dari rancang bangun KPHP dan KPHL yang diusulkan Gubernur selanjutnya disusun Arahan pencadangan KPH oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,
3. Berdasarkan dua tahapan diatas Gubernur menyampaikan Usulan Penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri, dan
4. berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyusun konsep Keputusan Menteri dan peta penetapan wilayah KPH melalui pembahasan dengan Eselon I terkait.
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penetapan KPH kepada Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek yuridis dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Berdasarkan Indikator dan target RPJMN Tahun 2015–2019 untuk pembangunan KPH pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu:

- a. Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH sejumlah 409 KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi;
- b. Rencana Pengelolaan KPH sejumlah 409 KPH yang dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Perkembangan penetapan lokasi fasilitasi KPH dan fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui BPKH sebagaimana butir 1.a dan 1.b sebagaimana pada tabel berikut.

Indikator	Tahun	5015	2016	2017	2018	2019	Jumlah	Sisa
Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH (unit)	Target	109	100	100	100	8	409	-
	Realisasi	114	100	100	86	20	420	-
Rencana Pengelolaan KPH (unit)	Target	109	100	100	100	11	420	-
	Realisasi	97	39	37	63	23	259	161

Sumber : Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan , Subdit PWAPSDH

Penjelasan :

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Adanya dukungan dana/anggaran dari pihak donor (World Bank) melalui Forest Investment Program (FIP) Project II.
- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:
Penyebab keberhasilan kegiatan berupa kerjasama yang baik antar instansi/pihak terkait dan kinerja tim pelaksana terkoordinir dengan baik.

Adapun penyebab kegagalan adalah adanya perubahan wilayah KPH di beberapa provinsi, beberapa usulan perubahan belum selesai (dalam proses).

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Kegiatan beberapa lembaga donor yang mendukung penetapan KPH, antara lain GIZ-Forclime, USAID Bijak, GGI, USPS.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
 - a. Terbitnya SK fasilitasi untuk seluruh unit KPH
 - b. SK penetapan lokasi fasilitasi KPH Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses.
- Upaya perbaikan ke depan
 - a. Instansi pusat dan daerah saling bersinergi menuju kesepakatan dalam proses pembangunan KPH.
 - b. Kegiatan Rapat Koordinasi KPH Nasional serta beberapa Workshop Nasional KPH seyogyanya dapat dijadikan momentum untuk mendorong optimalisasi kinerja KPH sehingga dari tahun ke tahun seluruh wilayah KPH tanpa terkecuali semakin bertambah maju.
 - c. Acara yang bertaraf nasional dalam hubungannya dengan pembangunan KPH, perlu tindak lanjut yang signifikan sehingga mampu mendorong keberhasilan KPH dalam pengelolaan hutan. Foto Kegiatan Rakornas KPH Tahun 2019 sebagai berikut :



Gambar 1-3 : Rakornas KPH Tahun 2019

2. Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK) yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (Tabel 14)**.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Pekerjaan tahun 2019 relatif lebih berat karena penyusunan dan penetapan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) mendapatkan perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar PIAPS dapat mengakomodir para pihak terkait yaitu :

1. Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
6. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
7. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
8. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
10. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
11. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
12. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
13. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
14. Perum Perhutani

Tabel 14 : Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan pada 34 provinsi

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (HA)				TOTAL LUAS
		HA	HT	RE	PIAPS IV	
1	Aceh	125.204	234.972		3.834	364.010
2	Sumatera Utara	302.993	462.763		413.027	1.178.783
3	Sumatera Barat	183.705	45.558		511.888	741.151

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (HA)				TOTAL LUAS
		HA	HT	RE	PIAPS IV	
4	Riau	135.551	1.564.638		453.032	2.153.221
5	Jambi	56.045	680.636	149.807	960.342	1.846.830
6	Sumatera Selatan		1.334.903	85.050	199.160	1.619.113
7	Bengkulu	64.988		60.470	232.251	357.709
8	Lampung		108.909	12.672	101.192	222.773
9	Kep. Bangka Belitung		266.727		181.460	448.187
10	Kep. Riau				109.589	109.589
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat				299.242	299.242
13	Jawa Tengah				181.133	181.133
14	DI Yogyakarta				843	843
15	Jawa Timur				469.229	469.229
16	Banten				36.096	36.096
17	Bali				3.976	3.976

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (HA)				TOTAL LUAS
		HA	HT	RE	PIAPS IV	
18	Nusa Tenggara Barat	28.644	68.590		284.745	381.979
19	Nusa Tenggara Timur		54.175		519.969	574.144
20	Kalimantan Barat	1.092.030	1.929.852	14.080	1.098.293	4.134.255
21	Kalimantan Tengah	4.040.455	818.946	214.546	1.119.070	6.193.018
22	Kalimantan Selatan	209.181	553.202		106.659	869.042
23	Kalimantan Timur	3.213.340	1.710.635	86.450	274.186	5.284.611
24	Kalimantan Utara	2.164.726	242.185		212.778	2.619.689
25	Sulawesi Utara	26.800	7.500		90.131	124.431
26	Sulawesi Tengah	336.425	73.320		319.323	729.068
27	Sulawesi Selatan		21.430		302.818	324.248

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (HA)				TOTAL LUAS
		HA	HT	RE	PIAPS IV	
28	Sulawesi Utara		54.280		302.015	356.295
29	Gorontalo		74.146		42.263	116.409
30	Sulbar	30.525	47.610		72.576	150.711
31	Maluku	717.670	66.205		174.208	958.083
32	Maluku Utara	670.041	65.908		110.720	846.669
33	Papua Barat	2.978.978	99.980		571.908	3.650.866
34	Papua	2.503.524	898.645		2.236.174	5.638.343
TOTAL LUAS		18.880.825	11.485.715	623.075	11.994.128	42.983.743

Sumber : Seksi Alokasi dan Pemanfaatan SDH , Subdit Pembentukan Wilayah dan Alokasi PSDH

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - Alokasi anggaran yang tepat dan memadai
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:
 - a. Alokasi anggaran yang belum memadai
 - b. Input para pihak yang belum optimal
 - c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
 - a. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam penyusunan RPHJP KPHL/KPHP
 - b. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam proses perizinan pemanfaatan hutan
 - c. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam pengusulan program Perhutanan Sosial
 - d. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan.
- Upaya perbaikan ke depan :

- Alokasi anggaran yang memadai
- Optimalisasi input peran para pihak dalam penyusunan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS)
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait.

3. Seluruh KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTG

- Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :
 - Kegiatan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTN dan RKTP mulai dilaksanakan sejak tahun 2016;
 - Sampai dengan tahun 2016, jumlah KPH yang terintegrasi dalam RKTN dan RKTP adalah 205 KPH yang terdiri dari 147 KPH di luar Pulau Jawa, 1 KPH di Pulau Jawa dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;
 - Sampai dengan tahun 2017, jumlah KPH yang terintegrasi dalam RKTN dan RKTP adalah 332 KPH yang terdiri dari 69 KPHL, 119 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;
 - Sampai dengan tahun 2018, jumlah KPH yang sudah terintegrasi dalam RKTN dan RKTP adalah 390 KPH yang terdiri dari 97 KPHL, 149 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;
 - Pada tahun 2019, Pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP dilakukan terhadap 390 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP sah, yang terdiri dari 104 KPHL, 139 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;
 - Data blok tata hutan KPH (KPHL dan KPHP) diperoleh dari Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan kodifikasi dan pengelompokan blok tata

hutan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

- Hasil dari kodefikasi dan pengelompokan tersebut kemudian diintegrasikan dengan arahan ruang kawasan hutan dalam RKTN Tahun 2011-2030, dengan melakukan overlay dari kedua data tersebut; dan
 - Dari hasil analisis diperoleh data kesesuaian yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.
-
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :
Penggunaan anggaran cukup efisien dikarenakan adanya dukungan pembiayaan kegiatan dai GIZ Forclime.

 - Penyebab kegagalan :
 - Terdapat perbedaan target pencapaian pengintegrasian RKTN ke dalam KPH (600 KPH) dan target Rencana Pengelolaan (409 KPH) untuk tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini menyebabkan tidak akan tercapainya target Pengintegrasian KPH ke dalam RKTN/RKTP/RKTK; dan
 - Kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP sangat tergantung pada ketersediaan dokumen RPHJP KPH dan RKTP yang sudah disahkan. Jika dokumen-dokumen tersebut belum tersedia, maka kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu komitmen dari para pihak untuk menyusun RPHJP KPH dan RKTP sangat menentukan.

 - Kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP;
 - FGD untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah; dan
 - Rapat koordinasi dengan para pihak.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :
Terintegrasinya perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat tapak sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis.
 - Upaya perbaikan ke depan :
 - Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah;
 - Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang menangani penyusunan dan pengesahan RPHJP KPH;
 - Meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP;
 - Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan, pengesahan dan pengintegrasian RPHJP KPH dan RKTP dengan RKTN.
 - Dokumentasi :



Gambar 4. Rapat Penintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 5. Rapat Penintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 6 dan 7. Rapat Penintergasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTN dan RKTN di Provinsi Sulawesi Tengah

4. Seluruh KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikator seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebanyak 600 KPH, dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 652 KPH. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini melebihi 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Terjadinya penambahan jumlah KPH sampai dengan 652 KPH dikarenakan pada saat di awal perencanaan penyusunan Restra hanya KPHL dan KPHP yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWP. Pada perkembangan selanjutnya, jumlah KPHP dan KPHL yang telah terintegrasikan sejumlah 529 KPH. Dengan pertimbangan tersebut, maka dilakukan pengintegrasian KPHK dalam RTRWP. Pada saat perencanaan belum diketahui jumlah KPH tersebut dan baru diketahui setelah proses integrasi KPHK ke dalam RTRW yakni sejumlah 108 KPHK. Angka tersebut masih bersifat sementara dan terbuka, kemungkinan akan terus bertambah sesuai usulan dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Di awal periode renstra di tahun 2015, KPH yang dapat diintegrasikan dalam RTRWP hanya pada provinsi-provinsi yang telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP). Pada tahun itu, jumlah KPH yang provinsinya telah memiliki Perda RTRWP sejumlah 185 KPH. Pada tahun 2016, metode pengintegrasian diubah dengan berdasarkan kepada pendekatan pulau.

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan kegiatan pengintegrasian KPH dengan RTRWP karena sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pengintegrasian hanya dilakukan pada KPH yang telah beroperasi. Sementara sampai dengan akhir tahun 2019 belum diketahui secara pasti jumlah KPH yang telah beroperasi, baik pada KPHP, KPHL, maupun KPHK. Dengan demikian tujuan integrasi untuk

membantu pengelola hutan dalam menyiapkan perencanaan hutan sudah tidak diperlukan lagi bagi KPH yang telah beroperasi.

Plaksanaan kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan tingkat capaian pada tahun 2017 sebanyak 208 KPH, tahun 2016 sebanyak 336 KPH dan tahun 2015 sebanyak 256 KPH. Meskipun demikian, kesesuaian capaian dengan target renstra telah tercapai yaitu sebanyak 652 KPH telah terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dari target 600 KPH yang direncanakan.

Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPH dan KPHL seperti Direktorat KPHP, Ditjen dan Direktorat KPHL, Ditjen BPDASHL sehingga memudahkan dalam pengumpulan data terkini dan teraktual terkait dengan kawasan KPHP dan KPHL.
- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPHK seperti Direktorat PIKA, Direktorat KK, dan Direktorat PJLHK, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data terkini dan teraktual terkait dengan kawasan KPHK.
- Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan tools pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya rapat internal untuk persiapan pelaksanaan guna mendukung kelancaran kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- Adanya rapat dengan para pihak terkait rencana dan pembahasan hasil integrasi KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah tersedianya atlas pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan KPHK lebih lanjut.



Gambar 8 : Dokumentasi Kegiatan Pengintegrasian KPHK dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

5. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH

Indikator Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH sebanyak 4 provinsi dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 4 provinsi. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH dalam kurun Renstra 2015 – 2019 hanya ada di tahun 2019.

Bentuk kegiatan ini berupa koordinasi dalam rangka pengelolaan dan penguatan kelembagaan KPH di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Papua, Riau, Sumatera Utara. Pada kegiatan ini juga dilakukan revisi terhadap P.6 / 2010 menjadi Pedoman Pengelolaan KPH.

- Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara lain:

Adanya dukungan dana dari Project II FIP serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana serta target pencapaian output kegiatan.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

Dibentuknya Tim Review Peraturan Perundang-Undangan Terkait KPH yang menyusun draft revisi P.6 Tahun 2010 menjadi Pedoman Pengelolaan KPH, yang anggotanya berasal dari Kementerian LHK maupun beberapa dari lembaga donor (GIZ, USAID Bijak).

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah draft Pedoman Pengelolaan KPH.

6. Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Pelaksanaan pekerjaan dari tahun ke tahun cenderung tetap, perbedaan di setiap tahun adalah kegiatan tahunan yang dilakukan (penyerapan anggaran) yang merata di sepanjang tahun 2019.
Proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan , Proses Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan, Proses IPPKH melalui Lembaga OSS, dan Proses IPPKH melalui non OSS sebagai mana terlampir pada **Lampiran 5**
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, program sesuai dengan SDM yang ada.
- Penyebab keberhasilan dan kegagalan:
Keberhasilan : Semangat Kerja, focus dan integritas yang tinggi; sarana dan prasarana memadai, dan kualitas SDM yang baik.
Kegagalan : Volume pekerjaan tidak sebanding kuantitas SDM yang ada.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan :
Pelatihan keterampilan bagi SDM, dukungan pimpinan, sarana prasarana lengkap.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Proses perizinan terlayani maksimal dengan adanya perbaikan system dalam pelayanan, dan revisi peraturan terkait Penggunaan Kawasan Hutan.

- Upaya perbaikan ke depan :

Peningkatan keterampilan SDM melalui Pelatihan, time schedule untuk setiap program kerja, sarana prasarana memadai (contoh : kondisi ruangan yang sejuk, printe/plotter/PC computer dapat digunakan dengan baik, ketersediaan ATK lengkap dan penambahan SDM yang disesuaikan dengan Volume pekerjaan.

b. Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Minimal 80%

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)**

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dengan kompensasi membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan rasio 1:1 (satu berbanding satu). Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah transaksi pembayaran PNBP-PKH sebanyak 1.153, pembayaran PNBP disetor langsung ke Bandara Umum Negara (BUN) melalui aplikasi online SIMPONI yang dapat diakses pada alamat website :www.simoni.kemenkeu.go.id. Oleh karenanya monitoring terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh pemegang IPPKH sebagai Wajib Bayar (WB) PNBP-PKH dapat dilakukan secara *online*.

Target pendapatan PNBP-PKH tahun 2019 sebesar Rp. 1.164.514.574.450,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.121.568.893.935,- (182,18%) berasal dari IPPKH untuk sektor pertambangan sebesar Rp. 2.081.907.903.598,- dan IPPKH untuk sektor non tambang tahun 2019 sebesar Rp.

29.660.990.337,- dari realisasi tersebut terdapat pembayaran dimuka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp. 3.711.439.500,-

- **Permasalahan Penatausahaan PNBP-PKH**

Dalam P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan PNBP-PKH tidak ada di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), namun demikian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.443/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan PNBP yang berkaitan dengan Penggunaan Kawasan Hutan. Penatausahaan PNBP-PKH dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam hal ini Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi dengan segala keterbatasannya, yaitu :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas penatausahaan PNBP-PKH dibandingkan dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaan pembayaran PNBP-PKH nya
- 2) Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dan memperlancar kegiatan panata usahaan PNBP-PKH
- 3) Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran PNBP-PKH
- 4) Belum dilakukan penyesuaian aturan terkait penatausahaan PNBP-PKH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP

- 5) Belum dapat menggunakan sebagian pendapatan PNBP-PKH untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penatausahaan PNBP-PKH.

7. Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

- Perbandingan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan update terbaru yang lebih kompleks dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Bantuan dana dari kerjasama internasional dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian data kepada para walidata untuk mengupdate data ke SINPASDOK KPH+ di 3 lokasi.
- Penyebab keberhasilan:
Sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian data kepada para walidata untuk mengupdate data ke SINPASDOK KPH+
- Faktor yang menunjang keberhasilan :
 - Komitmen ASN
- Faktor yang menunjang kegagalan:
 - Kurangnya fasilitas hardware seperti server dan jaringan internet yang cepat untuk mendukung kelancaran updating data.
 - Kurangnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (terutama di wilayah Indonesia bagian timur) untuk melatih para walidata untuk mengupdate data ke sistem informasi
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Kompleksitas, keterbaharuan dan validitas data
- Upaya perbaikan ke depan

- Pengajuan tambahan anggaran untuk pengadaan hardware dan menyampaikan keluhan tentang jaringan internet ke Pusdatin
- Pengajuan anggaran untuk bantuan dana dari NGO atau kerjasama internasional

8. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Layanan Perkantoran)

Indikator kinerja tersebut terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat.

Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra : Kegiatan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor.

Kendala yang seringkali dihadapi dalam rangka layanan perkantoran yaitu dikarenakan kondisi peralatan yang sudah mulai mengalami kerusakan dan perlu perbaikan dan seringkali menghambat pekerjaan. Namun kami

tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan tepat waktu. Upaya kedepannya, kami akan mengusulkan rencana pembelian peralatan kantor untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran supaya kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

9. Data Areal Perhutanan Sosial Jawa

Pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan selama 2 tahun , yaitu tahun 2018 dan 2019, dengan target tiap tahunnya sebanyak 4 provinsi : yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengan dan Jawa Timur. Indikator kinerja data Perhutanan Sosial Jawa masing-masing tahun telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 Provinsi per tahun yaitu provinsi yang termasuk pada wilayah kerja Perum Perhutani. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **sangat baik**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan terhadap skema perhutanan sosial yang sesuai dimplementasikan di Pulau Jawa sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

- Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial Jawa disebabkan beberapa hal antara lain:
 - Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survey terestis merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan peralatan seperti ketersediaan alat GPS (*Global Position System*), *drone*, dan instrumen pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.

- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya lainnya.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan perhutanan sosial Jawa, antara lain:
 - Adanya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.
 - Adanya Evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.
 - Adanya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
 - Adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dengan menghadirkan narasumber yang tepat dengan mengundang kelompok tani/pemegang ijin perhutanan sosial dan pendamping.

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah tersedianya data perhutanan sosial wilayah jawa berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial.

Upaya kedepan berupa tertibnya penjadwalan dan penentuan lokus kegiatan penyediaan data Perhutanan Sosial sehingga kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.





Gambar 9 sd 11 : Dokumentasi kegiatan perhutanan sosial Jawa

10. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
 - FIP Proyek II yang menjadi tanggung jawab Komponen 1 yaitu penguatan, pengembangan, penyempurnaan atau revisi regulasi dan kebijakan untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH. Tahun kerja 2017 kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Dialog Antar Kementerian/Lembaga untuk membangun visi bagi pembangunan dan operasionalisasi KPH dan seri FGD untuk memperoleh bahan guna memperkaya usulan revisi PP 44/2004; PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 35/2002. Hasil DAKL & 3 FGD ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen PKTL No. S. 237/PKTL/Ren/Pla.0/3/2018 tanggal 7 Maret 2018 yg ditujukan kepada Sekjen KLHK dan tembusan kepada Dirjen PHPL, Dirjen PSKL dan Dirjen PDAS HL. Isi surat Dirjen PKTL yaitu bahan guna memperkaya usulan revisi PP 44/2004; PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 35/2002.

- 2018 melaksanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan 2017, untuk penguatan, pengembangan, penyempurnaan atau revisi regulasi dan kebijakan untuk pembangunan dan oprasionalisasi KPH digunakan metoda Workshop dan FGD baik regional maupun nasional. Realisasi kegiatan komponen 1 sebesar 85 % (baik), secara ringkas capaian disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kegiatan Komponen 1

No	Kemajuan Komponen	
	Kegiatan 2018	Realisasi 2018
1	1.1.2 Pengembangan Efektivitas Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penggunaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS : Regional Sumatera (Pangkal Pinang, 27 April); Regional Kalimantan, Sulawesi & Bali – Nusa Tenggara (Mataram, 26 juli); Nasional (Yogya, 27 Agustus). ▪ Peserta: Dishut Prop, 10 KPH target, perwakilan KPH dan BPKH ▪ Hasil : Konsep Manual Identifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan oleh KPH
2	1.1.3 Pengembangan Mekanisme Pembiayaan APBN dan APBD untuk pembiayaan KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 1 kali (Jakarta, 1 November) ▪ Peserta: KPH, BAPPEDA Prop, Dishut ▪ Hasil : rumusan bahan usulan / rekomendasi penyusunan modul Integrasi Pembangunan & Operasionalisasi KPH ke dalam RPJMD
3	1.1.4 Perbaikan dan perubahan peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 1 kali (Jakarta, 31 Oktober) ▪ Peserta: KLHK (Dit ITPHH, Biro Keu, Biro Perencanaan), Kemendagri (Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bangda). BAPPENAS ▪ Hasil : penyempurnaan & pengembangan bahan usulan revisi PP 35 Tahun 2002 tentang DR
4	1.1.5 Pengembangan Kebijakan Tingkat Masyarakat di KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS di 7 KPH (21 sd 24 November); WS Nasional 1 kali (Mataram, 26 Juli) ▪ Peserta: Kelompok Tani Hutan, Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten, Pedagang Hasil Bumi, KPH, BAPPEDA Kabupaten.

No	Kemajuan Komponen	
	Kegiatan 2018	Realisasi 2018
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil: rumusan bahan usulan / rekomendasi kebijakan tingkat masyarakat di KPH : Fasilitasi KPH dalam perizinan masyarakat; pengaturan, pemanfaatan, peredaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan; Bagi hasil antar pihak; Kerjasama KPH dengan BUMDes /BU lainnya.
5	1.1.6 Review dan perubahan PP.6/2007 serta peraturan lain	Tidak terealisasi
6	1.1.7 Pengembangan Sistem Monitoring dan Pelaporan Pemegang Lisensi di KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 1 kali (Jakarta, 14 Desember) ▪ Peserta: Narasumber, Dinas Kehutanan, KPH ▪ Hasil : Konsep Permen LHK tentang Pedoman Pemantauan & Laporan Pemegang Ijin di KPH
7	1.1.8 Penetapan KPH sebagai PPK BLUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WS 2 kali (Jakarta, Oktober dan 13 Desember) ▪ Peserta: Narasumber, Dinas Kehutanan, KPH ▪ Hasil: konsep Manual / Lesson Learned Pengusulan UPTD KPH menjadi UPTD KPH BLUD

- Tahun 2019 serapan anggaran mencapai Rp. 3,916 milyar (93 %), serapan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Workshop dengan topik dari kegiatan 1.1.3, 1.1.5 dan 1.1.8 di hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, pada tanggal 25 Juli 2019.
 - b. FGD dengan topik dari kegiatan 1.1.3, 1.1.5 dan 1.1.8 di hotel Menara Peninsula Jakarta (26, 27 dan 28 November 2019)
 - c. Jasa Konsultan dengan output: Konsep manual integrasi program pembangunan KPH ke dalam RPJMD, Identifikasi dan mereview NSPK yang ada, dan menyusun rekomendasi arah perubahan / penyempurnaan NSPK dengan mempertimbangkan pengaturan pad UU

23 tahun 2014, Hasil review aspek legal, aspek kehutanan dan aspek kelembagaan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat, Hasil review aspek tenaga kerja lokal terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat dan menyusun Konsep–manual untuk optimasi tenaga kerja lokal pada kegiatan usaha / produksi di KPH, Hasil review aspek pinjaman usaha kehutanan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat dan menyusun Konsep prosedur KPH sebagai fasilitator dan penjamin bagi Kelompok Tani Hutan yang mengajukan kredit pinjaman kepada BLU

- d. Selain dana HLN Murni 2019, juga terdapat Dana luncuran DANIDA 2018 (berlaku Januari 2019 sd Juni 2019) untuk melaksanakan:
- ✓ Study Banding ke Divisi Regional I PERUM PERHUTANI Jawa Tengah, di Semarang (29 April sd 1 Mei 2019).
 - ✓ Pelatihan Penyusunan Persyaratan Administrasi UPTD KPH sebagai BLUD di Solo (2 sd 3 Mei 2019)
 - ✓ Workshop Perencanaan Pengelolaan Hutan Dalam Upaya Membangun UPTD Perencanaan Hutan di Semarang (24 - 26 Juni 2019)

Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Realisasi Keuangan dan Kegiatan Komponen 1 – sd November 2019

Sub Komponen	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.1.3	Pengembangan Mekanisme Pembiayaan APBN & APBD untuk Pembangunan KPH (1.1.3)	495.390	482.589,637	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Workshop Topik 1 di Yogya (25 Juli 2019) ✓ FGD di Jkt (26 November 2019)
1.1.5	Pengembangan Kebijakan untuk level Masyarakat (1.1.5)	2.403.800	2.244.088,637	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Workshop Topik 2 di Yogya (25 Juli 2019) ✓ FGD di Jkt (27 November 2019)
1.1.8	Pembentukan KPH sebagai BLUD (1.1.8)	1.307.310	1.189.648,400	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Workshop Topik 3 di Yogya (25 Juli 2019) ✓ FGD di Jkt (28 November 2019)
		1.721.000	1.325.000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Studi banding ke Perhutani, Pelatihan BLUD dan WS

Sub Komponen	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Keterangan
				Perencanaan Pengelolaan Hutan (April, Mei & Juni 2019). Dana DANIDA 2018 yang diperpanjang sd Juni 2019
	Jumlah	4.206.500	3.916.326, 674	93%

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
 - Penggabungan beberapa kegiatan worksop atau FGD dengan kegiatan lainnya. Efisiensi yang didapat yaitu penghematan uang transport peserta workshop / FGD dari daerah ke pusat.
- Penyebab kegagalan:
 - Keterlambatan rekrutmen konsultan individu (proses lelang harus diperpanjang karena kekurangan peserta lelang)
 - pelaksanaan beberapa workshop digabung, maka mengurangi biaya transport dan akomodasi;
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja 2018
 - ❖ Hasil kegiatan Komponen 1 pada 2019 yaitu tersusunnya konsep manual/alat kelengkapan kerja/toolkit dan rumusan atau rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Konsep manual integrasi program pembangunan KPH ke dalam RPJMD.
 - 2) Identifikasi dan mereview NSPK yang ada, dan menyusun rekomendasi arah perubahan / penyempurnaan NSPK dengan mempertimbangkan pengaturan pad UU 23 tahun 2014

- 3) Hasil review aspek legal, aspek kehutanan dan aspek kelembagaan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat antara lain :
- a. Perhutanan Sosial, Kerjasama dan Kemitraan di KPH;
 - b. Bagi Hasil Kerjasama & Kemitraan usaha pemanfaatan hutan di KPH;
 - c. Penguatan Kelembagaan dan SDM di KPH
 - 1) Hasil review aspek tenaga kerja lokal terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat dan menyusun Konsep-manual untuk optimasi tenaga kerja lokal pada kegiatan usaha / produksi di KPH
 - 2) Hasil review aspek pinjaman usaha kehutanan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat dan menyusun Konsep prosedur KPH sebagai fasilitator dan penjamin bagi Kelompok Tani Hutan yang mengajukan kredit pinjaman kepada BLU

- ❖ Capaian terhadap Outcomes :
 - ✓ Pengaturan UPTD KPH secara fungsional harus merealisasikan praktek pengelolaan hutan lestari dengan prestasi nyata di lapangan yaitu tegakan hutan berkualitas, pendapatan masyarakat meningkat dan investasi kehutanan meningkat.
 - ✓ Masyarakat sebagai subyek dalam operasionalisasi UPTD KPH melalui Program Perhutanan Sosial dan kegiatan usaha tani hutan perlu pengaturan bagi hasil yang adil sesuai dengan potensi resiko yang ditanggungnya.
 - ✓ Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) merupakan kegiatan investasi pemerintah wajib berada di dalam areal kerja di KPH.

- ✓ Dalam sistem akuntansi yg sedang dikembangkan, tegakan hutan dikategorikan sebagai aset biologi (biological asset), maka pembiayaan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) dari belanja barang menjadi belanja modal. Untuk itu perlu diatur mekanisme hibah tanaman RHL hibah agar dapat menjadi aset UPTD KPH.
- ✓ Anggaran pemerintah sangat terbatas, investasi masyarakat perlu dijamin keamanan investasi dan kepastian usaha pada usaha kehutanan.
- ✓ Untuk mengatasi keterbatasan SDM, pembiayaan dan data informasi serta untuk kemandirian UPTD KPH perlu mewujudkan sebagai UPTD KPH BLUD.
- ✓ Merangkai mata rantai hubungan Pusat, Provinsi dan UPTD KPH dalam hubungan kewenangan, tupoksi, SDM, keuangan, pengawasan dan pemanfaatan SDH.
- ✓ Dengan disusunnya konsep – konsep manual/petunjuk kerja/alat kelengkapan kerja/toolkit, maka UPTD KPH dapat mendukung pelaksanaan praktek pengelolaan hutan lestari.
- Upaya perbaikan ke depan

Terhadap hasil kegiatan tahun 2019, kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya yaitu dilakukan serangkaian kegiatan melalui rapat, FGD dan workshop. Rapat/FGD/WS tersebut untuk lebih banyak pemangku kepentingan yang berpartisipasi untuk berkontribusi dalam penyusunan konsep konsep manual/petunjuk kerja/alat kelengkapan kerja/toolkit dan rumusan atau rekomendasi suatu kebijakan.

11. Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP

Indikator Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP sebanyak 15 provinsi (50 peserta) dan telah mencapai target dengan capaian

sebanyak 7 (tujuh) provinsi (47 peserta). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 94 % dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: Tahun 2015 s/d Tahun 2018, kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personel KPH maupun BPKH dalam penyusunan RPHJP berbentuk Lokalahir Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, bentuk kegiatan ini lebih bersifat semacam pelatihan dengan materi-materi yang terkait untuk penyusunan RPHJP KPH.

Sedangkan tahun 2019 bentuk kegiatannya berupa pembahasan RPHJP per Bab dengan dipandu tim penilai RPHJP dari eselon I KLHK terkait. Selanjutnya peserta diminta untuk melakukan *self assessment* atau *peer assessment* terhadap draft dokumen RPHJP masing-masing, untuk kemudian diberi arahan, tips dan masukan untuk perbaikan oleh tim penilai RPHJP.

- Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara lain:
Provinsi yang terdapat banyak KPH yang belum menyusun RPHJP lebih diutamakan, sehingga pertimbangan pemanggilan peserta bukan berdasar target provinsi melainkan jumlah KPH terbanyak dalam suatu provinsi yang belum/dalam proses menyusun dokumen RPHJP.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain pihak BPKH mengundang Pihak Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah untuk melaksanakan kegiatan penilaian RPHJP di daerah.
- Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan adalah tersusunnya RPHJP sesuai dengan P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2019, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang dalam DIPA Tahun 2019 yang telah disahkan tanggal 5 Desember 2018, yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.8.830.186.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp.32.883.150.000,-. Namun pada tahun berjalan terdapat revisi anggaran DIPA menjadi Rp. Rp.49.242.011.000, sesuai DIPA Revisi 5 Tanggal 19 Desember 2019 yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp. 9.030.186.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 40.211.825.000,-.

Sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebesar 78,38% dan capaian kinerja rata2 100%, dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Hal ini disebabkan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan memiliki 2 (dua) sumber anggaran yaitu APBN dan HLN dengan rincian sebagai berikut :

Pagu APBN :

1. Jumlah Pagu Anggaran Rp. 9.030.186.000,-
2. Realisasi Anggaran (Netto) Rp. 8.860.401.869,- (98,12 %) dan Fisik 99,98 %.

Sedangkan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan rincian :

1. Jumlah Anggaran Rp. 40.211.285,000-
2. Realisasi Anggaran Rp. 29.737.966.747,- (73,95%) dan Fisik sebesar 88,04%

kegiatan HLN terdapat deviasi keuangan sebesar 26,05%. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan tergantung *Annual Work Planning /AWP*) dari Bank Dunia

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, khusus untuk bantuan Hibah Luar Negeri proses pencairan anggaran tergantung *Annual Work Planning* (AWP) dari Bank Dunia.
2. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis, administrasi dan verifikator keuangan.
4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Perlunya membuat tata waktu penyelesaian SPJ.
3. Pengusulan penambahan staf administrasi dan verifikator keuangan.
4. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
5. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS.

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *“berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”*.

SAKIP diimplementasikan secara *“self assesment”* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2018 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 78,54 dengan kategori BB (SANGAT BAIK), yang bermakna perlu sedikit perbaikan.

Beberapa hal yang harus diperbaiki adalah Laporan Kinerja Tahun 2018 yang perlu disempurnakan agar lebih informatif. Rekomendasi perbaikan ini telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun 2019 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap

bulan dengan menginput data capaian keluaran/output *online* melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

V. PENUTUP

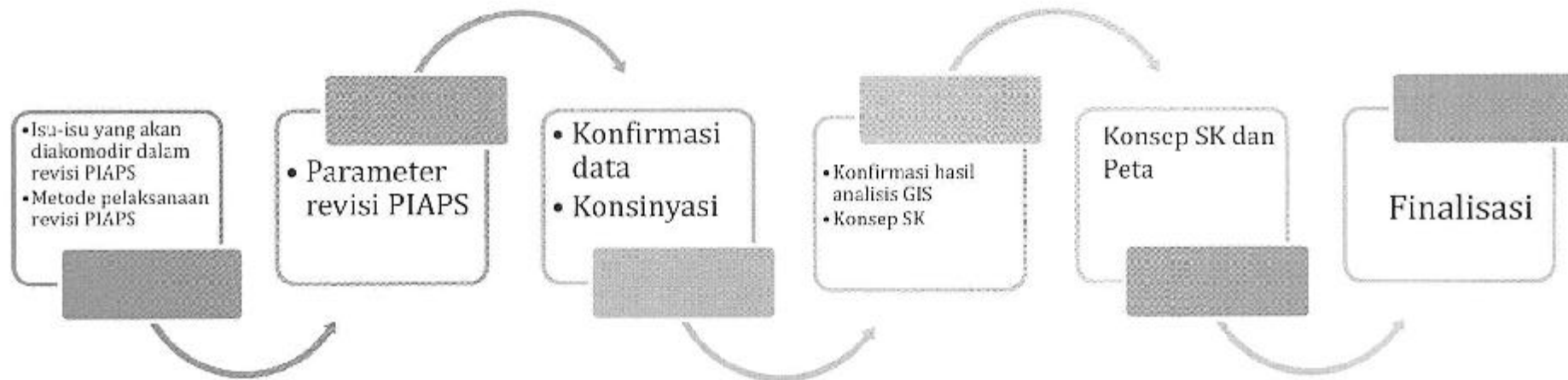
Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, dimana Rencana Kerja Tahun 2019 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2019 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2019 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja '***Sangat Baik***' hal ini terlihat dari 11 unit kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 100% dengan realisasi anggaran (netto) 78,38%.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2019 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana Kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan.

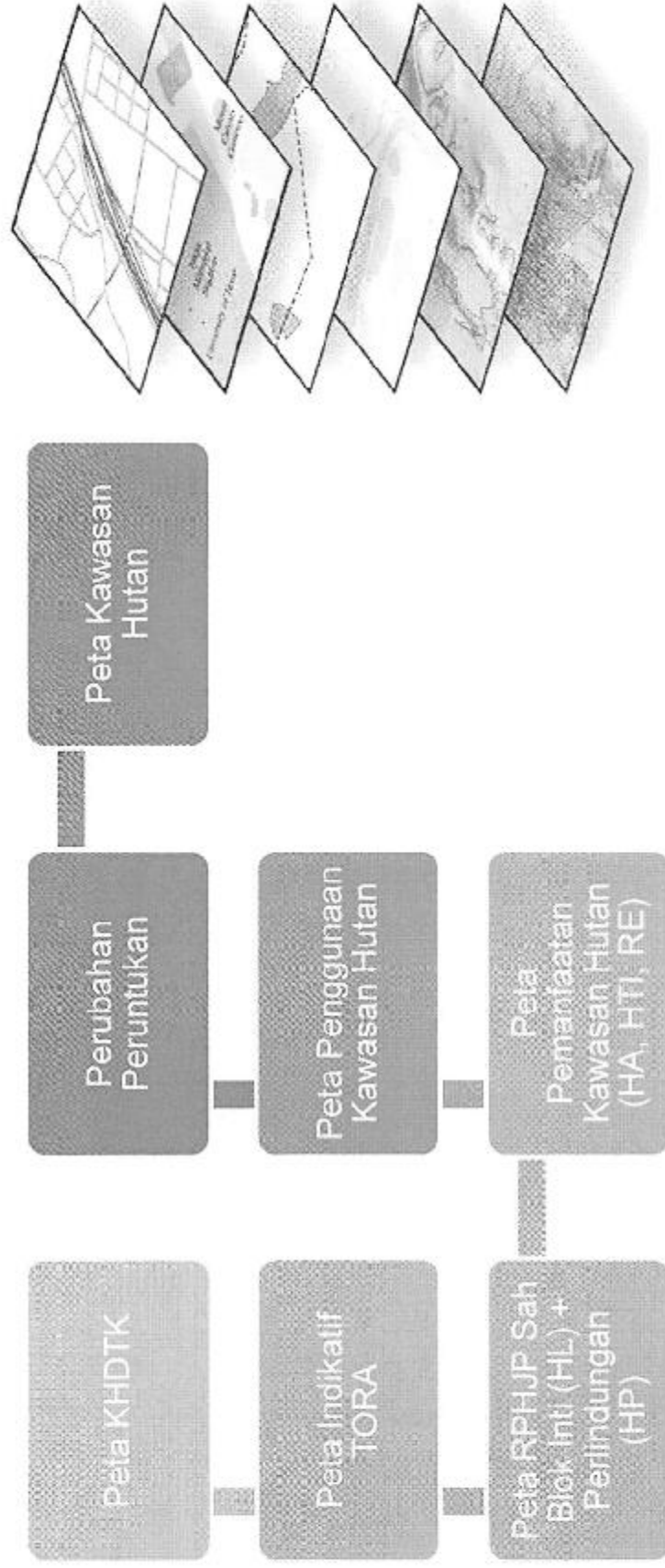
Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN										
<i>Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya</i> Tanpa Sub Out Put	<i>Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi</i>	100-(%) Persen	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Mitigasi perubahan iklim	Tidak
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		100-(%) Persen								
Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%		80-(%) Persen								
<i>Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan</i> Tanpa Sub Out Put	<i>Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH</i>	409-KPH (Update)	Pusat	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP		409-KPH (Update)								
<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community</i> Tanpa Sub Output		1-Laporan								
<i>Jumlah provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan</i> Tanpa Sub Out Put	<i>Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi</i>	34-Provinsi	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH		34-Provinsi								
<i>Seluruh KPH terintegrasi dalam tata Ruang Wilayah,</i>		34-Provinsi								
<i>Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah</i> Tanpa Sub Out Put		34-Provinsi	Pusat	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP		34-Provinsi								
<i>Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG</i> Tanpa Sub Out Put		600-KPH (Update)	Pusat	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH		600-KPH (Update)								
<i>Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH</i> Tanpa Sub Output		4-Provinsi	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH		4-Provinsi								
<i>Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan</i> Tanpa Sub Out Put	<i>Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan,</i>	3-Dokumen	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
011-Layanan Internal Organisasi		78-poin								
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan		3-Dokumen								
<i>Data areal perhutanan sosial Jawa</i>	<i>Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</i>	4-Provinsi	Pusat	Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui	Percepatan Pengurangan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Output		4-Provinsi								

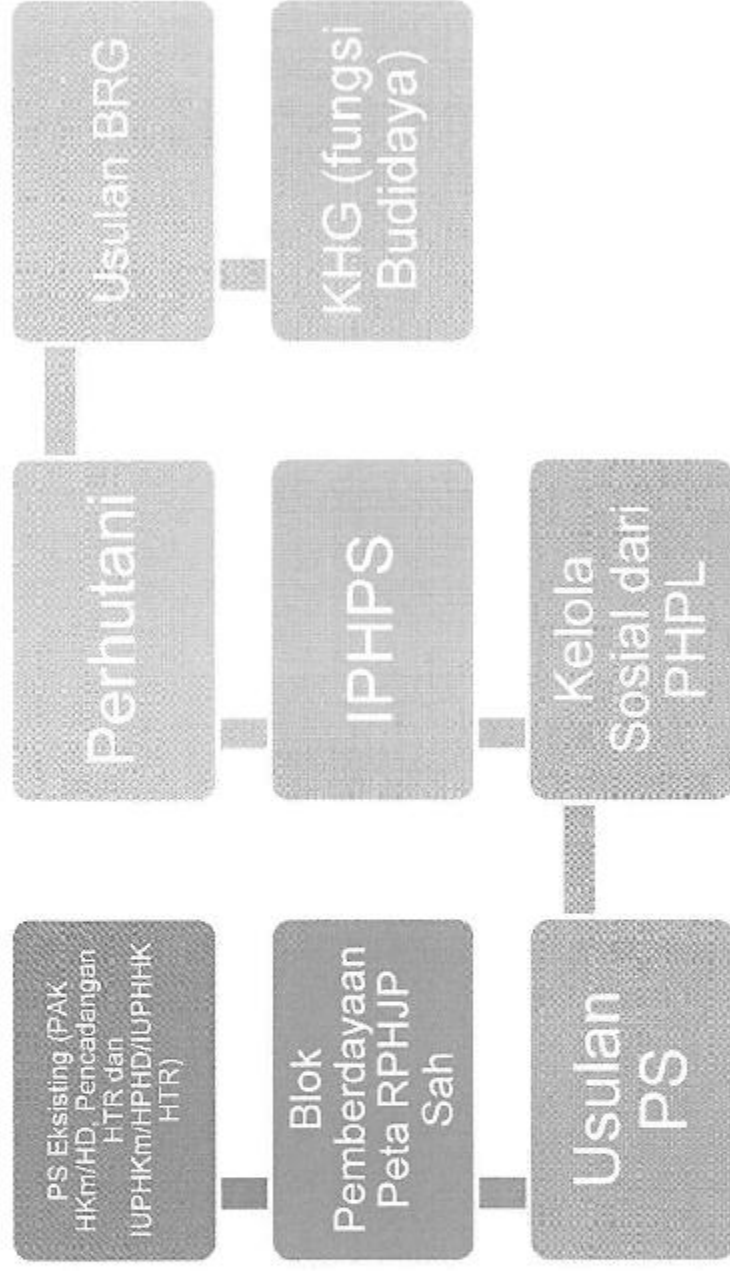
KRONOLOGI PELAKSANAAN PIAPS



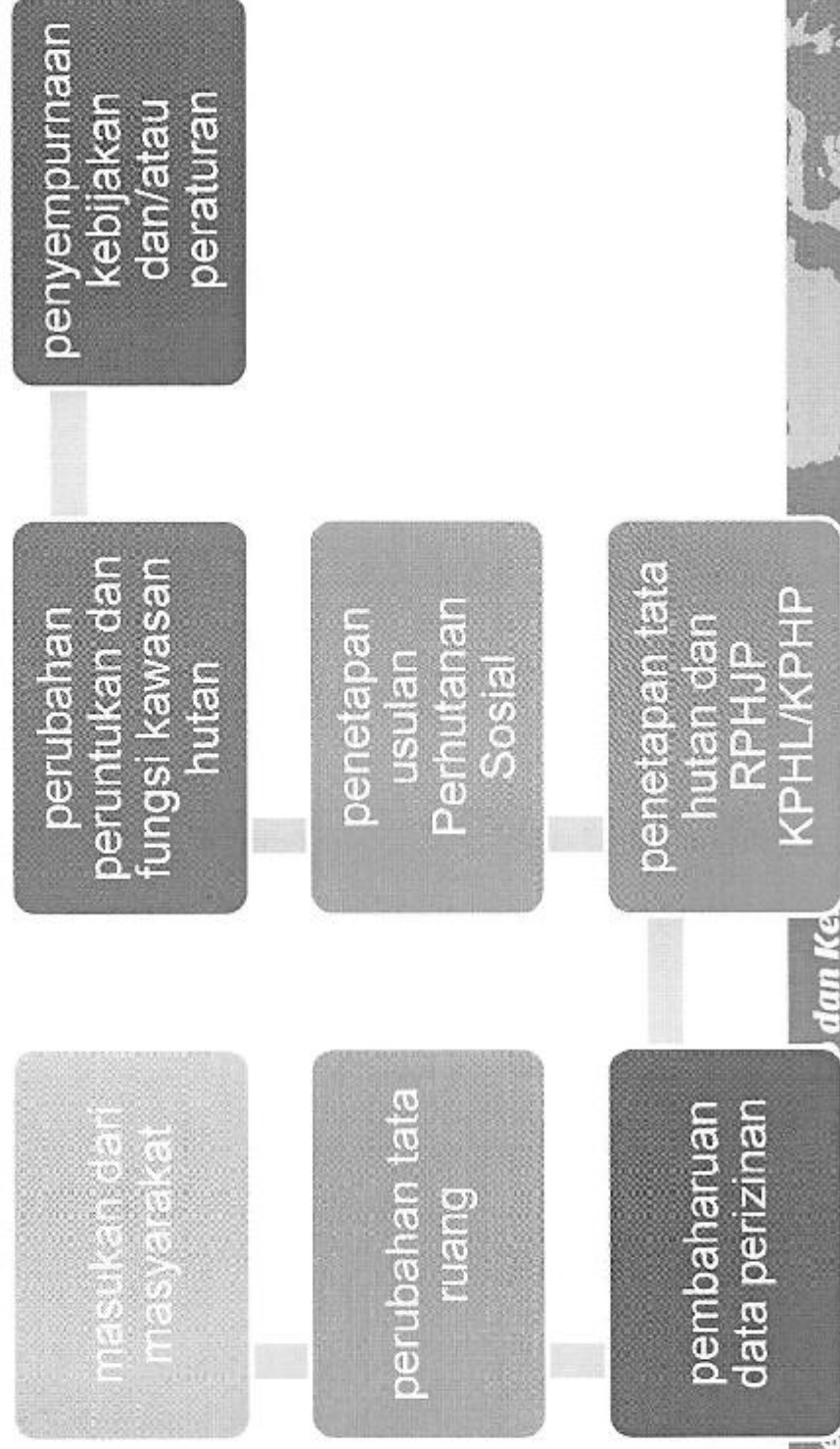
Sumber Data PIAPS



Sumber Data PIAPS



Revisi PIAPS dilakukan dengan memperhatikan :



REKAP PERMOHONAN IPPKH KEPADA MENTERI MELALUI DIREKTUR (PERMEN LHK P.27 TAHUN 2018)

NO	KEGIATAN	Unit	Luas
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	270	1,709,264
2	IPPKH untuk Eksplorasi	48	187,710
3	Persetujuan untuk Survei	13	1,481,442
4	Perpanjangan IPPKH	42	56,951.83
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Penambahan sebagian areal IPPKH	26	1,173,339
6	Penetapan Areal Kerja	63	117,889
7	Persetujuan Kerjasama	22	161.579
8	Calon Lahan Kompensasi	10	136.777
9	BAST Lahan Kompensasi	3	317,338.935
JUMLAH		497	5,044,233

NO.	PEMOHON	SURAT PERMOHONAN	LOKASI	LUAS (HA)	PENGGUNAAN
249	Pemerintah Kabupaten Sarmi	660/127/DLH-SMI/XI/2019 tanggal 14 November 2019	Kab. Sarmi, Prov Papua	19.71	TPA Sampah
250	PT. Selo Agung	01/SA/XI-2019 tanggal 13 November 2019	Kabupaten Purwakarta, Prov Jawa Barat	11.84	OP Galian C Batu Andesit DMP
251	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PS.03.01-Mn/2175 tanggal 20 November 2019	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumsel	145.51	Bendungan Tiga Dihaji
252	PT. Sofa Nugraha	027/SP/PT-SOFA NUGRAHA/XI/2019 tanggal 13 November 2019	Kabupaten Bogor Prov Jawa Barat	8.09	OP Galian C Batu Andesit DMP
253	CV. Ilvas Karya	218/SP-IK/XI/2019 tanggal 27 November 2019	Kabupaten Konawe Selatan, Prov Sultra	59.74	OP Batu Gamping
254	PT. Karya Pratama Mining	02/ADM-KPM/XI/2019 tanggal 27 November 2019	Kabupaten Konawe Selatan, Prov Sultra	138.07	OP Batu Gamping
255	Kementerian Perhubungan	KA.101/B.282/DJKA/2019 tanggal 18 November 2019	Kab. Pare Pare, Prov. Sulawesi Selatan	2.05	Jalur Kereta Api
256	PT. Mas Sari	09/MS/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	751.17	OP Batubara
257	PT. Supreme Energy Rantau Dedap	RD-RSS-LTR.116.XII.2019 tanggal 4 Desember 2019	Kab. Muara Enim Pro. Sumsel	86.94	OP Panas Bumi
258	PT. Rau Green Energy	013/RGE/DIR/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019	Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	6	PLTbm
259	PT. Budhi Jaya Mineral	032/BJM/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019	Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara	1128.46	OP Batu Gamping
260	PT. Adaro Indonesia	AI/06-XII/19/AH-HG/ERD tanggal 17 Desember 2019	Kab. Tabalong dan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan	661.37	OP Batubara
261	PT. Kaltim Jaya Bara	004/KJB-DIR/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	495.72	OP Batubara
262	SKK Migas - Ophir	SRT-0684/SKKMA0000/2019/S0 tanggal 6 November 2019	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	40.6	OP Migas
263	SKK Migas - PT. Medco E&P Indonesia	SRT-0750/SKKMA0000/2019/S0 tanggal 27 November 2019	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	3.12	Pembangunan Pipa ROW Migas
264	CV. Chandra Jaya	015/CJ/IPPKH/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019	Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi		Penambangan
265	PT. Pahala Maha Jaya	01/SP.LHK.PMJ.20.12/2019 tanggal 20 Desember 2019	Kab. Tuban Prov. Jawa Timur	3.12	OP Pasir Kwarsa
266	PT. Lawaki Tiar Raya	026/Dir-LTR/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019	Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	1000.29	OP Nikel
267	PT. Aragon Tambang Pratama	061/ATP-LGL/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Utara	700	OP Batubara
268	Pemerintah Kabupaten Pasaman	600/1080/DPU-TR-PAS/2019 tanggal 17 Desember 2019	Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat		Jalan Rao - Padang Lawas
269	PT. PLN (Persero)	2424/KON.00.03/010300/2019 tanggal 20 Desember 2019	Kab. Pakpak Barat, Prov. Sumatera Utara	3.27	PLTA Air Kombih
270	PT. Arkamira memorial Stone	137/CTT/TF/Legal/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019	Kab. Pankep, Prov. Sulsel	12.13	OP Marmer

1.709.264.17

51	Kementerian Pertahanan RI	B/8019/09/02/103/BARANAHAN tanggal 12 Desember 2019	Kab.Langkat Provinsi Umatera Utara	99938	Lapangan Tembak Senjata Berat Armed TNI
52	PT. Bintani Megahindah	247/DIR/BMI/FORS/XII/2019 tanggal 08 November 2019	Kab.Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara	515.55	OP. Bijih Besi
53	PT. Rencana Mulia Baratama	023/RMB-TTB/XI/2019 tanggal 5 November 2019	Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	76.43	Hauling Batubara
54	Unahaa Bakti Persada, CV	093.04.01/UBP/11/2019 tanggal 4 November 2019	Prov Sulawesi Tenggara	63.73	OP Nikel
55	Wira Bara Sakti, PT	024/WBS-DJPKTL/XI/2019 tanggal 11 November 2019	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	70.93	OP Batubara
56	Setia Maju Pratama, PT	002/SMP-PENETAPAN/XI/2019 tanggal 13 November 2019	Kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung	124.87	OP Pasir Kuarsa DSP
57	Transportasi Gas Indonesia, PT	018/EXT/TGI/PD-LGL/11/19 tanggal 13 November 2019	Kab. Indragi Hilir, Indragiri Hulu, Kab. Siak. Prov. Riau	203.79	Jalur Pipa Gas
58	Ngali Sumbawa Mining,PT	20/PT.NSM/IX/2019 tanggal 1 November 2019	Kab. Sumba, NTB	51.13	OP Mangan
59	Karya Usaha Pertiwi,PT	050/KUP/XI/2019 tanggal 26 November 2019	Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	193.19	OP Batubara
60	Angsana Jaya Energi, PT	13/IPPKH-AJE/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	88.4	OP Batubara
61	Belitung Sand Mining, PT	111/BSM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019	Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung	126.85	OP Pasir Kuarsa
62	Bintani Megah Indah, PT	248/DIR/BMI/FORS/XI/2019 tanggal 25 November 2019	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	53.96	OP Bijih Besi
63	Trans Power Indonesia, PT.	054/TPI-JKT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	905.09	OP Batubara
				117,888.91	

REKAPITULASI PERMOHONAN KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SD DESEMBER 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL PERMOHONAN	KEGIATAN	LUAS (HA)	LOKASI
1	Dishut Pemerintah Prov. Sumatera Utara	522/0305 tanggal 29 Januari 2019	Peningkatan Alur/Jalan umum	105.75	Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
2	Sdr. Mustain	0052/044.3/Sekper/Dir/2019 tanggal 20 Maret 2019	Sarana Pengangkutan Hasil Produksi	0.91	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur
3	Bupati Jepara	0026/044.3/Sekper/Dir/2019 tanggal 15 Februari 2019	Peningkatan Kualitas Jalan	8.68	Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	PT. Batu kali Welang Ampuh	0032/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 24 Februari 2019	Jalan angkutan Hasil Produksi	0.37	Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur
5	Bupati Nganjuk	0019/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 14 Februari 2019	Jalan Borrow Area dan Quarry Area	11.1	Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur
6	PT. Kereta Cepat Indonesia China	0024/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 15 Februari 2019	Akses Konstruksi	1.43	Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
7	PT. PLN (Persero)	0090/044.3/Sekper/Dir/2019 tanggal 25 April 2019	Jalur Listrik Msuk Desa	0.16	Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
8	PT. PLN (Persero)	0089/0444.3/Sekper/Dir/2019 tanggal 25 April 2019	Pemasangan Jaringan Listrik	0.37	Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	522.1/205/PRPH-PR/2019 tanggal 26 Maret 2019	Pembangunan PLTMH	0.69	Kab. Pasaman Provinsi Sumatera Barat
10	Pemerintah Kab. Banyuasin	522/029-II/Wil.III/2019 tanggal 14 Februari 2019	Pemasangan Jaringan Listrik	6.55	Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga	620/6211/103/2019 tanggal 2 April 2019	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan	10.39	Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
12	PT.Pertamina EP	0111/044.3/SEKPER/DIR/2019	Pemasangan Pipa Gas	0.25	Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
13	Pemerintah Kab. Dairi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	522/0438 tanggal 13 Februari 2019	Pembangunan Rest Area	2.65	Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara
14	PT. Rekyasa Industri -JGC Corporation -JGC	0146/044.3/SEKPER/DIR/2019	Pemasangan Jaringan Listrik Tegangan 20 V	3.9	Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
15	PT.Pertamina EP Cepu	298/044.3/renSDH/Dir/2017 tanggal 29 November 2017	Mobilisasi Peralatan berat proyek Pengembangan Gas lapangan Unitisasi Jambaran - Tung Biru	3.54	Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
16	Sdr. Sukim	0084/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 18 April 2019	Alur/Jalan	0.4	Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah
17	PT. Protelindo	0019/Protelindo/Perm-V/2019 tanggal 29 April 2019	Pembangunan Tower Telekomunikasi	0.0294	Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
18	Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama	0093/044.3/Sekper/Dir/2019 tanggal 04 Mei 2019	Jaringan Transmisi Air Bakusistem penvedia Air Minum	0,03	Kab. Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
19	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL	0195/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 13 September 2019	Towe Radic	0.01	Kab. Malang Provinsi Jawa Timur
20	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	0211/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 11 Oktober 2019	Jalan akses Pembangunan Bendungan Randugunting	2,78	Kab. Blora Provinsi Jawa Timur
21	PT.PLN (Persero)	0037/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 03 Maret 2019	Jaringan listrik 20 KV	1.04	Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur
22	PT. Banyuresmi Artha	0216/044.3/SEKPER/DIR/2019 tanggal 24 Oktober 2019	Alur/Jalan untuk Angkutan Hasil Produksi	3.36	Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat
				161.5794	

PERMOHONAN CALON LAHAN KOMPENSASI IPPKH SD DESMBER 2019

NO.	PEMOHON	SURAT PERMOHONAN	PENGGUNAAN	LUAS (HA)	LOKASI
1	CV.Kibar Sarimukti	005/KSM/IV/2019 tanggal 14 April 2019	OP. Batu Gamping dsp	20.19	Cipatat Provinsi Jawa Barat
2	PT. Perusahaan GAS Negara Tbk	06601.S/HK.01/PER/2019 tanggal 22 April 2019	Pipa South Sumatera West Java	4.73	Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
3	PT. PLN (Persero)	0570/KON.02.02/DITHCM/2019 tanggal 2 April 2019	Pembangunan Jaringan transmisi SUTT 150 KV Semen Indonesia Incomer	31.69	Kab. Semarang Povinsi Jawa Tengah
4	PT. Agung Satria Abadi	239/ASA/IPPKH/IV/2019 tanggal 22 April 2019	OP.Sirtu dsp	15.08	Kab. Sumenep Provinsi Jawa Timur
5	PT. Trimahesa Cakrawala	1.593/DIR.TC/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019	OP.Batu Andesit	21.42	Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat
6	PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) - Star Energy Geothermal Wawajo Windu Ltd (SEGW/L)	046/HD/JOPR/VII/20:9 tanggal 09 Juli 2019	Panas Bumi	18,63	Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
7	PT. Perusahaan GAS Negara (Persero) Tbk	006605.S/IIK.01/PER/2019 tanggal 19 Agustus 2019	Pembangunan Jalur Pipa SSWJ dsp	11.67	Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
8	PT. Natarang Mning	137/NM/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019	OP.Emas Dmp	100,40	Kab. Tanggamus Provinsi Lampung
9	PT. Jawa Satu Power	222/15P1000/2019-S0 tanggal 22 Oktober 2019	PLTGU Jawa-1 dsp	32.00	Kab. Garut Provinsi Jawa Barat
10	PT.PLN (Persero)	2139/kon.00.01/010202/2019 Tanggal 18 November 2019	Tata Batas dan Penyerahan Lakom PLTU 3 Banten	21,54	Kab. Tangerang Provinsi Banten
				136,777	

DAFTAR IPPKH OPERASI PRODUKSI DAN IPPKH NON PERTAMBANGAN YANG TERBIT TAHUN 2019

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
1	GORONTALO	Non Tambang	Loka Indah Lestari, PT (Sawindo Cemerlang, PT)	Pembangunan Jalan Akses Kebun	SK.20/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	8/01/2019	30/01/2023	Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo	59.6400
2	JAWA BARAT	Tambang	Akama Marindo, PT	Pertambangan Bahan Galian C	SK.193/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	1/03/2019	5/06/2023	KH. Gunung Kasur, Desa Cipatat, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	20.0300
3	MALUKU UTARA	Tambang	Antam Tbk., PT	Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya Serta	SK.207/MenLHK/Setjen/PLA.0/3/2019	6/03/2019	26/10/2040	Fulau Pakat, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara	456.0300
4	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Asmin Koalindo Tuhup, PT	Pertambangan Batubara	SK.21/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019	8/01/2019	-	Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng	1.050.6500
5	JAMBI	Tambang	Bakti Sarobangun Sejahtera, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.480/Menhk/Setjen/PLA.0/7/2019	24/07/2019	29/05/2028	Kab. Serolongan, Prov. Jambi	822.1800
6	RIAU	Tambang	Bara Batu Ampar Prima, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.202/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	0/03/2019	5/10/2019	Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau	218.7400
7	BENGGKULU	Tambang	Bara Indah Lestari, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.143/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	13/02/2019	30/08/2022	KHPT, Bukit Badas, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu	577.2800
8	JAWA BARAT	Tambang	Gurung Kecapi, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (galian C)	SK.345/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2019	15/05/2019	8/03/2024	Kolompok Hutun Plerod Barat, BFKH Purwakarta, Desa Liunggunung, Kec. Plerod	5.1000
9	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Baratala Tuntang Pandang, PD	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.750/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	30/09/2019	30/04/2020	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel	23.4900
10	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Bnum Rantau Energi, PT	Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjang	SK.231/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	19/03/2019	24/06/2020	Kec. Piani, Kab. Tapin, Prov. Kalsel	89.9000
11	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Bocowa Mining, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.727/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	25/09/2019	29/01/2031	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	904.9000
12	BENGGKULU	Tambang	Bukit Sunur, PT	Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya	SK.746/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	27/09/2019	24/06/2021	Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	700.0000
13	SULAWESI SELATAN	Tambang	Citra Lampia Mandiri (Tahap II), FT	Operasi Produksi Bijih Nikel Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.686/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	16/09/2019	3/09/2029	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	977.1000
14	RIAU	Tambang	SKKM GAS - EMP Malacca Strait S.A (Hudbay Oil Ltd.)	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Sarana	SK.640/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2019	30/08/2019	3/08/2040	Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau	278.6700
15	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Ganda Alam Makmur, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.888/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	18/10/2019	29/05/2027	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	975.5300

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
16	SULAWESI UTARA	Tambang	Hakian Wellem Rumansi, PT	Operasi Produksi Tambang Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.923/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	18/10/2019	29/11/2025	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	99.9900
17	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Indoninco Mandiri, PT	Pertambangan Batubara	SK.656/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	30/08/2019	31/03/2028	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	906.1000
18	SUMATERA SELATAN	Tambang	SKMIGAS-Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT	Pengembangan Lapangan Gas dan Jalur Pipa	SK.890/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	18/10/2019	9/02/2039	Kab. Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi dan Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	248.5300
19	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Jorong Earutama Gestor (perpanjangan), PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.671/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	10/09/2019	9/12/2029	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	1.865.3400
20	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Kalimantan Energi Lestar, PT	Operasi Produksi/Ekspansi Batubara dan Sarana	SK.184/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	27/02/2019	5/09/2031	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	552.7200
21	KEPLAJAN RIAU	Tambang	Karimun Granite, PT	Operasi Produksi Bahan Galian Granite	SK.213/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	6/03/2019	6/09/2023	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	1.082.6300
22	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Kitacin, PT (Perpanjangan)	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.387/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2019	13/06/2019	18/06/2023	Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim	1.433.5740
23	JAWA TIMUR	Tambang	Kual Mas Adilama, PT	Penambangan Batu Felcspar	SK.365/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2019	28/05/2019	22/08/2023	Desa Kedungsigit & Jati, Kec. Karang, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	4.1250
24	KALIMANTAN UTARA	Tambang	Mitra Dara Jaya, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.763/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	7/10/2019	16/05/2028	Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara	903.2300
25	SULAWESI TENGAH	Non Tambang	Hentraco Indoperkasa, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.837/MenLHK/Setjen/PLA.0/10/2019	17/10/2019	23/09/2025	Kab. Mowali, Prov. Sulawesi Tengah	13.0020
26	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Nusantara Berau Coal, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.1020/Menhk/Setjen/PLA.0/12/2019	2/12/2019	18/06/2025	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	591.6700
27	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Wampu Electric Power, PT (Mega Power Mandiri)	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Sarana	SK.252/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	28/03/2019	17/06/2042	Kel. Hutan Jeleng Cengkeh (REG 7/K), Desa RIH Tengah, Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara	59.8200
28	ACEH	Non Tambang	Senagan Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Sarana	SK.863/Menhk/Setjen/PLA.0/8/2019	30/08/2019	28/02/2038	Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh	19.0200
29	JAWA TENGAH	Non Tambang	Sumarah Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.210/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	6/03/2019	21/08/2029	Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah	0.5200
30	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Putra Mekongga Sejahtera, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.688/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	12/09/2019	22/12/2029	Kec. Pomaas, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	349.4200
31	JAWA TIMUR	Tambang	Semen Indonesia (Persero), PT / (Semen Gresik (Persero) Tbk, PT)	Penambangan Batu Gamping dan Sarana Penunjangnya	SK.278/Menhk/Setjen/Pla.0/4/2019	10/04/2019	14/05/2029	EKPH Kerek, KPH Tuban, Desa Temandang, Kab. Tuban	532.3000

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
32	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Telen Orbit Prima, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.334/MenLHK/Setjen/ PLA.0/5/2019	13/05/2019	20/03/2027	Kab. Kapuas, Prov. Kalteng	259.0000
33	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Tunas Hili Abadi, PT	Pertambangan Batubara	SK.264/MenLHK/Setjen/ PLA.0/4/2019	11/04/2019	5/03/2031	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	300.0000
34	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Yiwan Mining, PT	Eksplorasi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.311/MenLHK/Setjen/ PI A.0/4/2019	29/04/2019	4/08/2029	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	377.3900
35	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Tunas Hili Abadi, PT	Operasi Produksi Balubara dan Sarana Penunjangnya	SK.793/MenLHK/Setjen/ PLA.0/10/2019	14/10/2019	5/03/2021	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	308.5300
36	JAWA BARAT	Non Tambang	Arkora Hydro, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.572/MenLHK/Setjen/ PLA.0/9/2019	20/03/2019	1/03/2032	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	4.5600
37	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Hidup Hidayah Iltchi, CV	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.705/MenLHK/Setjen/ PLA.0/9/2019	18/03/2019	29/04/2025	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	22.2100
38	BENGKULU	Non Tambang	Satung Brantas Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.391/MenLHK/Setjen/ PLA.0/1/2019	17/01/2019	15/02/2037	Kab. Kaur, Prov. Bengkulu	14.4000
39	JAWA BARAT	Tambang	Karya Wangi Saçara, PT	Penambangan Batu Andesit	SK.228/MenLHK/Setjen/ PLA.0/3/2019	15/03/2019	13/12/2023	RPH Ciwaringin, BKPH Ciwaringin, KPH Majalengka, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	8.1000
40	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Kasongan Bumi Kencana (Tahap I), PT	Operasi Produksi Emas Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.586/MenLHK/Setjen/ PKTL.0/8/2019	22/08/2019	30/05/2023	Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah	49.2800
41	JAWA TENGAH	Tambang	SKKMIGAS-Pertamina EP Cepu ADK, PT	Eksisting Pengembangan Lapangan Produksi	SK.724/MenLHK/Setjen/ PLA.0/9/2019	24/09/2019	26/02/2044	Kab. Bora, Prov. Jawa Tengah	13.0287
42	JAWA TIMUR	Non Tambang	Bupati Tulungagung	Pembangunan Jalan Lintas Selatan	SK.531/MenLHK/Setjen/ PLA.0/10/2019	10/10/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur	120.2947
43	BENGKULU	Tambang	Inti Bara Perdana, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.803/MenLHK/Setjen/ PLA.0/10/2019	15/10/2019	10/03/2029	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	350.3300
44	JAWA BARAT	Tambang	An-Nakhl, CV	Operasi Produksi Batu Trass	SK.666/MenLHK/Setjen/ PLA.0/8/2019	30/08/2019	24/06/2024	Kab. Cirebon, Prov. Jawa barat	6.3000
45	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	SKKMIGAS-Wilayah Kerja Mahakam (SKKMIGAS-Total E&F Indonesia)	Operasi Produksi Migas dan Sarana Penunjangnya	SK.908/MenLHK/Setjen/ PLA.0/10/2019	18/10/2013	31/12/2037	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1.925.4000
46	NUSA TENGGARA TIMUR	Non Tambang	Muna Sumba Manis, PT	Pembangunan Embung Intaka	SK.678/MenLHK/Setjen/ PLA.0/9/2019	11/09/2019	Selama Masih Dgunakan	Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur	0.6600
47	SULAWESI SELATAN	Tambang	Bukit Bunea, PT	Operasi Produksi Marmer dan Sarana Penunjangnya	SK.78/MenLHK/Setjen/ PLA.0/1/2019	21/01/2019	26/03/2023	Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov Sulawesi Selatan	48.8000

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
48	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Permatang Panggang - Kayu	SK.751/Menhk/Setjen/PLA.0/9/2019	30/09/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan	34.5000
49	JAWA TIMUR	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Malang	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur	SK.44/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	17/01/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Malang, Prov. Jawa Timur	89.7951
50	KALIMANTAN SELATAN	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pembangunan Jalan Umum	SK.714/MenLHK/Setjen/PLA.0/9/2019	20/09/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan	50.1000
51	SULAWESI TENGAH	Tambang	Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.95/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	28/01/2019	20/08/2030	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	127.1400
52	JAWA TENGAH	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Randugunting	SK.45/Menhk/Setjen/PLA.3/1/2019	17/01/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	204.9830
53	KALIMANTAN TENGAH	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Lamandau	Pembangunan Jalan Desa Kina - Desa Karang Mas dan Jalan	SK.90/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	21/01/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah	20.2200
54	KALIMANTAN TIMUR	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150 Kv Bangkanai - Melak	SK.65/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	18/01/2019	27/09/2046	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dan Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	105.6000
55	JAWA TIMUR	Tambang	Agung Satrya Abadi, PT	Operasi Produksi Sirtu dan Sarana Penunjangnya	SK.120/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	6/02/2019	5/09/2023	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	7.1380
56	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Global Bara Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.119/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	6/02/2019	29/12/2036	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	331.9500
57	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Huma Amaz Indonesia, PI	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.142/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	13/02/2019	19/04/2025	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	336.7400
58	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Madani Sejahtera, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.137/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	13/02/2019	3/06/2033	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	55.5000
59	JAWA TIMUR	Non Tambang	Parrenang Highlands, PT	Akses Jalan Menuju Lokasi Agrowisata	SK.107/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	31/01/2019	31/01/2039	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	0.9600
60	PAPUA BARAT	Non Tambang	Pernota Putera Mandiri, PT	Jalan Angkutan Perkebunan Kelapa Sawit	SK.103/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	31/01/2019	31/01/2039	Kab. Sorong Selatan, Prov. Papua Barat	11.4800
61	PAPUA BARAT	Tambang	SKKMIGAS-Montdor Sawatati Ltd.	Operasi Produksi Pengeboran Sumur Baladewa A-1 dan	SK.106/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2019	31/01/2019	30/12/2033	Kab. Sorong Prov. Papua Barat	6.5000
62	KALIMANTAN TENGAH	Non Tambang	BangunNusantara JayaMakmur, PT	Jetty dan Jalan Hauling	SK.159/Menhk/Setjen/PLA.0/3/2019	6/03/2019	6/03/2026	Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah	58.9200
63	MALUKU UTARA	Tambang	Halmahera Sukses Mineral, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.175/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2019	25/02/2019	8/11/2030	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	909.2000

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
64	BENGKULU	Non Tambang	Pertamina Geothermal Energy, PT	Pengembangan Kegiatan Panas Bumi dan Sarana	SK 211/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019	6/03/2019	17/09/2044	KH Lindung Bukit Daun, Kab. Lebong dan Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu	129.4100
65	JAWA TENGAH	Tambang	Semen Grogogan, PT	Operasi Produksi Batu Gamping	SK 171/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	25/02/2019	25/04/2031	Kab. Grogogan, Prov. Jawa Tengah	31.4000
66	RIAU	Tambang	SKKMIGAS - Badan Operasi Bersama Bumi Siak Pusako, PT - Pertamina Hulu	Eksplorasi Pengaloran Sumur Beruk-07 (BRK-P07) dan Beruk-10	SK 188/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	23/02/2019	5/08/2022	Kab. Siak, Prov. Riau	2.6900
67	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Antang Gunung Meratus, PT	Operasi Produksi Batubara	SK 687/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019	12/09/2019	1/07/2029	Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan	110.2100
68	JAWA TENGAH	Tambang	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., PT	Operasi Produksi Pasir Kwarsa dan Sarana Penunjangnya	SK 156/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	18/02/2019	5/11/2022	Kab. Rejang, Prov. Jawa Tengah	118.5800
69	KEPULAUAN RIAU	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Nasional Simpang Sekunjam-Teluk Depit	SK 130/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	20/02/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	25.6300
70	KEPULAUAN RIAU	Non Tambang	Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT	Pembangunan Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi	SK 217/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019	6/03/2019	27/03/2027	Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau	51.0500
71	KALIMANTAN TENGAH	Non Tambang	Pemerintahan Kabupaten Katingan	Pembangunan Jalan Umum Hampangan-Mandawai	SK 149/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	18/02/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah	1,353.1300
72	NUSA TENGGARA BARAT	Tambang	Bumi Pasir Mandiri, PT	Operasi Produksi Batu Kapur	SK 824/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019	17/10/2019	9/11/2020	Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	64.4400
73	SULAWESI TENGAH	Tambang	Oliaya Abadi, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK 225/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019	15/03/2019	15/05/2038	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	649.8700
74	SUMATERA SELATAN	Tambang	SKKMIGAS - Pertamina EP, PT	Eksplorasi Pengaloran Sumur SPA-DZ3 Dan Akses Jalan Masuk	SK 245/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019	25/03/2019	16/09/2035	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	3.8000
75	JAMBI	Tambang	Sarolangun Ketalo Coal, PT	Operasi Produksi Batubara	SK 260/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	1/04/2019	8/01/2029	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	627.6200
76	NUSA TENGGARA BARAT	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jaringan Irigasi Tanjung Kiri	SK 250/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019	28/03/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat	14.2200
77	KEPULAUAN RIAU	Tambang	Mitra Persada Resources, PT	Operasi Produksi Batu Granit dan Sarana Penunjangnya	SK 266/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	4/04/2019	26/03/2023	Kab. Lingga, Prov. Riau	57.9700
78	JAWA BARAT	Tambang	Koperasi Keluarga Kesejahtera Sejahtera	Operasi Bahan Galian C (Pasir)	SK 170/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	25/02/2019	2/07/2023	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	4.3000
79	SUMATERA SELATAN	Tambang	Bara Anugerah Sejahtera, PT	Pembangunan Jalan Angkut Batubara	SK 280/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	10/04/2019	7/05/2029	Kab. Muara Enim dan Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan	26.8400

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
96	SULAWESI TENGAH	Tambang	Vale Indonesia Tbk., PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK 341/Menhk/Setjen/Pla.0/5/2019	14/05/2019	28/12/2025	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	2.143.1400
97	MALUKU UTARA	Tambang	Weda Bay Nickel PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK 373/Menhk/Setjen/Pla.0/5/2019	31/05/2019	27/02/2048	Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara	938.1400
98	KALIMANTAN UTARA	Non Tambang	Atha Marti Naha Krento, PT	Pembangunan Peabuan Khusus dan Sarana Penunjangnya	SK 496/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	26/07/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara	7.1100
99	MALUKU UTARA	Tambang	Bintani Megahindah, PT	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	SK 488/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	26/07/2019	29/1/2029	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	53.9700
100	KALIMANTAN BARAT	Tambang	Borneo Mandiri Mineral, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK 442/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	12/07/2019	23/11/2036	Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	457.7900
101	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Hsi Fernando Sejahtera, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK 452/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	15/07/2019	25/03/2021	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	257.6000
102	GORONTALO	Tambang	Gorontalo Minerals, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK 489/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	24/07/2019	26/02/2043	Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo	992.2000
103	KALIMANTAN TIMUR	Non Tambang	Graha Power Kaltim, PT	Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara	SK 457/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	15/07/2019	14/02/2043	Kab. Bontang, Prov. Kalimantan Timur	30.1900
104	JAWA BARAT	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi	SK 423/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	5/07/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	111.1400
105	JAWA TENGAH	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv	SK 439/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	10/07/2019	27/09/2046	Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah	2.9170
106	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Pusat Koperasi Kartika Mulawarman	Operasi Produksi Batuan dan Sarana Penunjangnya	SK 455/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	15/07/2019	24/07/2023	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	92.7700
107	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Sangga Borneo, CV	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK 443/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	12/07/2019	3/09/2024	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	66.6800
108	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	SumbagselEnergi Sakti Pawai, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut	SK 486/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	24/07/2019	Sesuai masa berlaku IUPTL	Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan	102.3600
109	PAPUA BARAT	Tambang	SKKMIGAS-Petrogas (Basin) Ltd	Eksplorasi Pemboran Sumur Pengembangan Wairo #318, Wairo	SK 482/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	24/07/2019	5/10/2023	Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	4.3200
110	MALUKU UTARA	Tambang	Tri Usaha Baru, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK 485/Menhk/Setjen/Pla.0/7/2019	24/07/2019	24/07/2036	Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara	240.2000
111	SUMATERA BARAT	Non Tambang	Dempo Sumber Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK 514/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	2/08/2019	30/05/2036	Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat	54.1800

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
112	JAWA BARAT	Tambang	Shanghyang Mineral, PT	Penambangan Bahan Galian C (Batu Camping)	SK.506/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	1/08/2019	22/07/2023	Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	6.8000
113	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Nemoasia, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.554/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	14/08/2019	4/02/2026	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	992.7000
114	KEPULAUAN RIAU	Tambang	Mirasindo Perdana, PT	Operasi Produksi Batu Granit dan Sarana Penunjangnya	SK.517/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	14/08/2019	7/10/2023	Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau	70.0700
115	JAMBI	Tambang	S-KKMI/GAS - Petrochina International Jabung Ltd.	Pengembangan Sumur Eksploitasi North East Betara #2	SK.527/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	7/08/2019	28/02/2023	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	4.0800
116	JAWA TIMUR	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Quarry Area Bendungan Sementok dan Pemindahan Jalan	SK.689/Menhk/Setjen/Pla.0/9/2019	12/09/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur	242.3300
117	SULAWESI TENGAH	Tambang	Bima Cakra Perkasa Mineralindo, FT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.566/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	19/09/2019	20/08/2030	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	70.3800
118	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Ceria Nugraha Indotama, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.573/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	20/08/2019	23/04/2032	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	623.4600
119	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Pembangkit Kortadaya, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Aek Kuala	SK.575/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	20/08/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara	26.0900
120	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	BangunNusantara JayaMakmur, PI	Sarana Penunjang Kegiatan Pertambangan	SK.660/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	30/08/2019	6/03/2026	Kab. Bario Timur, Prov. Kalimantan Tengah	32.2500
121	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	Cakra Adipratama, PT	Pembangunan Jalan Angkut Dalubera	SK.638/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	30/08/2019	3/07/2024	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	15.8300
122	BANGKA BELITUNG	Tambang	Karya Cipta Mandiri Persada, FT	Operasi Produksi Tanah Liat dan Sarana Penunjangnya	SK.667/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	30/08/2019	13/10/2025	Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	185.0000
123	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Kementerian Pertahanan	Pembangunan Lapangan Tembak Senjata Berat Amed	SK.675/Menhk/Setjen/Pla.0/9/2019	10/09/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara	10.0000
124	MALUKU UTARA	Non Tambang	Tekindo Energi, PT	Pembangunan Jalan Angkutan Tambang Bijih Nikel	SK.686/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	12/09/2019	21/12/2029	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	16.9700
125	BANGKA BELITUNG	Tambang	Tiana Perkasa Prima, CV	Operasi Produksi Batuan (Tanah Liat) Dan Sarana	SK.681/Menhk/Setjen/Pla.0/9/2019	11/05/2019	13/10/2025	Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	187.2900
126	JAWA BARAT	Tambang	Wijaya Karya Beton Tbk., FT	Operasi Produksi Batu Andesit dan Sarana Penunjangnya	SK.641/Menhk/Setjen/Pla.0/8/2019	30/08/2019	3/05/2023	Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	9.9500
127	GORONTALO	Non Tambang	Wilmar, Byatama Abadi, PT	Pembangunan Terminal Khusus	SK.679/Menhk/Setjen/Pla.0/9/2019	11/09/2019	Selama Izin Usaha Masih Bertaku	Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo	0.4800

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
128	KALIMANTAN TENGAH	Non Tambang	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan Rel Kereta Api Dan Sarana Pendukungnya	SK.532/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	8/08/2019	Selama Izin Usaha Masih Berlaku	Kab. Murung Raya, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, dan Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	1,662.1000
129	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Anugerah Tujuh Sejati, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.747/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	27/09/2019	1/03/2024	Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan	37.9300
130	BANGKA BELITUNG	Tambang	Belitung Sand Mining, PT	Operasi Produksi Pasir kuarsa	SK.609/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	17/09/2019	27/05/2024	Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung	125.5100
131	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Dharito Ekalama, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.704/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	18/09/2019	29/06/2041	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	227.1600
132	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Bhumi Rantau Energi, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.717/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	23/09/2019	24/06/2030	Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan	31.0400
133	RIAU	Tambang	Euana Tambang Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.739/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	27/09/2019	25/10/2021	Kab. Kampar, Prov. Riau	72.0600
134	JAWA TENGAH	Non Tambang	Indonesia Power, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.677/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	11/09/2019	1/01/2023	Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah	1.6400
135	JAWA TENGAH	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Nasional Dan Jembatan	SK.738/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	27/09/2019	Selama Masih Digunakan	Prov. Jawa Tengah dan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	44.4600
136	SULAWESI TENGAH	Tambang	Kencana Bumi Mineral, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.982/Menhk/Setjen/ Pla.0/11/2019	7/11/2019	-	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	982.1000
137	JAWA TIMUR	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur	SK.711/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	20/09/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur	27.3984
138	JAWA TIMUR	Tambang	Perdana Gas, PT	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Grosik - Semarang	SK.713/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	20/09/2019	20/09/2039	Kab. Bojonegara, Prov. Jawa Timur	0.4656
139	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Pembangunan Transmisi Sauran Udara Tegangan Tinggi	SK.706/Menhk/Setjen/ Pla.0/9/2019	19/09/2019	27/09/2046	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	25.6800
140	JAWA BARAT	Tambang	Antam Tbk., PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.805/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	14/11/2027	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	115.5800
141	SULAWESI TENGAH	Tambang	Anugerah Bangun Makmur, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.794/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	23/03/2035	Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah	352.1800
142	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Energy Sakti Sentosa, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pakkat 3x6	SK.790/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	11/10/2019	15/08/2049	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	0.6100
143	JAWA TENGAH	Non Tambang	Indonesia Power, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.759/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	7/10/2019	1/01/2023	Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah	0.3150

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
144	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Surya Kalimantan Sejahtera, PT	Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya	SK.897/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	13/09/2033	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	55.2300
145	BANGKA BELITUNG	Tambang	Karya Mandiri Persada Ecotung, PT	Operasi Produksi Solusur (Pasir Zargunung) Dan Sarana Penunjangnya	SK.782/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	10/10/2019	13/10/2025	Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	185.2100
146	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	Musi Mira Jaya, PT	Pembangunan Sarana Penunjang Jalan Angkut Batubara	SK.810/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	28/07/2023	Kab. Musi Banyuwasin, Prov. Sumatera Selatan	41.1300
147	SULAWESI TENGAH	Non Tambang	FLN (Persero), PT	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Pos3 - Pembangunan	SK.761/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	4/10/2019	27/09/2046	Kaa. Poso dan Kab. Topo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah	5.8300
148	JAMBI	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi	SK.770/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	7/10/2019	30/09/2046	Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	73.6900
149	JAWA TENGAH	Tambang	Sinar Tambang Ardhawastan, PT	Operasi Produksi Batu Gamping dan sarana penunjangnya	SK.752/Menhk/Setjen/ Pa.0/9/2019	30/09/2019	12/05/2035	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Tengah	100.1000
150	SULAWESI UTARA	Tambang	Sumber Energi Jaya, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.765/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	26/09/2031	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	187.9300
151	BANGKA BELITUNG	Tambang	Timah (Persero) Tbk, PT	Operasi Produksi Timan Dan Sarana Penunjangnya	SK.755/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	7/10/2019	20/07/2025	Kab. Bangka Selatan, Prov. Bangka Belitung	314.0300
152	RIAU	Tambang	Medco Ratch Power Riau, PT	Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Pipa Gas Bagi PLTGL	SK.891/Menhk/Setjen/ Pa.0/10/2019	18/10/2019	7/04/2037	Kota Pekanbaru, Prov. Riau	3.3100
153	JAWA TIMUR	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Watulimo	SK.807/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	15/10/2039	Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	16.2040
154	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Pemata Indah, CV	Operasi Produksi Batubara	SK.309/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	16/10/2019	1/02/2026	Kab. Bantio Utara, Prov. Kalimantan Tengah	688.5300
155	MALUKU UTARA	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Embung Sefiti	SK.802/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	Selama Masih Digmakan	Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara	14.8600
155	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Arsari Batu Karya, PT	Operasi Produksi Batu Gunting (Galian C) dan Sarana Penunjangnya	SK.814/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	17/10/2019	29/03/2023	Kab. Penejiam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur	141.5200
157	RIAU	Tambang	SKMIGAS - BOB PT Bumi Sak Fasko Pertamina hulu	Eksplorasi Pemboran Sumur BNE-P-01 Dan BNE-P03	SK.800/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	5/08/2022	Kab. Siak, Prov. Riau	1.4500
158	JAWA BARAT	Tambang	SKMIGAS - Pertamina EP, PT	Eksplorasi ABG-3 Dan Fasilitas Produksi Slas un Pengumpul	SK.932/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	1/10/2035	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	2.8800
159	JAWA BARAT	Non Tambang	Dahera Bayu Persada, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	SK.845/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	28/04/2029	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	4.1300

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
160	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Bangun Energi Sentosa, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Paket-2	SK.885/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	Sesuai masa berlaku IUPIL	Kab. Humbang Hasundutan & Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara	40.5600
161	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Bornéo Indobara, PT	Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya	SK.906/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	Belum Berlaku	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	994.4900
162	KALIMANTAN UTARA	Non Tambang	Pemerintah Kota Tarakan	Pembangunan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi	SK.924/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	Selama Masih Digunakan	Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	0.5300
163	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Gunung Bara Utama, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.909/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	2/11/2031	Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	351.5400
164	SUMATERA SELATAN	Tambang	Bukit Asam (Persero) Tbk, PT	Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya	SK.804/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	15/10/2019	7/09/2035	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	14.580.1100
165	SUMATERA BARAT	Tambang	Eumi Indonesia Bersinar, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.895/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	18/03/2039	Kab. Sook Selatan, Prov. Sumatera Barat	348.6200
166	KALIMANTAN TIMUR	Non Tambang	Fajar Sakti Prima, PT	Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Sarana	SK.829/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	17/10/2019	21/07/2025	Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur	376.5000
167	SUMATERA UTARA	Tambang	Jalanan Batubara Prima, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.900/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	10/09/2022	Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumatera Utara	203.4800
168	JAMBI	Non Tambang	Marga Bara Jaya, PT	Pembangunan Jalan Angkut Batubara	SK.816/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	17/10/2019	17/10/2039	Kab. Musi Rawas Utara dan Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dan Kab. Batanghari, Prov. Jambi	494.4100
169	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Mitra Barito, PT	Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya	SK.945/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	17/10/2019	20/06/2032	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	135.5500
170	BANGKA BELITUNG	Tambang	Mitra Slania Prima, PT	Operasi Produksi Rijih Timah	SK.834/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	17/10/2019	31/01/2028	Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung	21.9000
171	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Mutiara Merdeka Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.850/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	27/02/2032	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	139.5800
172	JAWA TIMUR	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pembangunan Bendungan Bagong	SK.868/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur	141.4800
173	KALIMANTAN BARAT	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Pembangunan SUTT 150Kv Tayan - Sancang - TX (Ketapang -	SK.813/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	16/10/2019	27/05/2046	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	33.9400
174	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Lndar Sea	SK.833/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	17/10/2019	27/06/2046	Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	6.1300
175	SUMATERA BARAT	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan / Peningkatan Kualitas Jalan Trans Mentawai	SK.907/Menhk/Setjen/ Pla.0/10/2019	18/10/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat	254.2400

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
176	SULAWESI TENGAH	Tambang	Multi Dinar Karya, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.929/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019	18/10/2019	24/05/2031	Kab. Tojo Una-Una, Prov. Sulawesi Tengah	553.0200
177	SULAWESI TENGAH	Tambang	Wasindo Perkasa, PT	Operasi Produksi Nikel Dmp dan Sarana Penunjangnya	SK.812/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019	16/10/2019	21/09/2021	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	460.0300
178	JAWA TIMUR	Non Tambang	PLN (Penero), PT	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 Kv Jatigedong -	SK.387/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019	18/10/2019	30/09/2046	Kab. Lamongan dan Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur	7.9250
179	SULAWESI TENGAH	Non Tambang	PLN (Penero), PT	Pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi	SK.913/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019	18/10/2019	27/09/2046	Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah	0.9500
180	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Mira Barito, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.045/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019	18/10/2019	20/06/2032	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	135.5500
181	SUMATERA BARAT	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan Jalan Kabupaten	SK.925/Menlhk/Setjen/Pla.0/10/2019	18/10/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat	89.5000
182	JAWA BARAT	Non Tambang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Ruas Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	SK.992/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2019	18/10/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat	100.6000
183	GORONTALO	Non Tambang	PLN (Penero), PT	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi T/L 150 KV Isimu -	SK.993/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2019	20/11/2019	27/09/2046	Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo	3.6400
184	KALIMANTAN SELATAN	Non Tambang	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru-Betulicin	SK.1003/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2019	21/11/2019	Selama Masih Digunakan	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	858.8900
185	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Dharma Bumi Kendari, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel	SK.1004/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2019	21/11/2019	31/12/2027	Kab. Korika Timur, Prov. Sulawesi Tenggara	126.3600
186	RIAU	Non Tambang	PT Hulama karya	Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Duriel	SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/			Kab. Bersu Provinsi Kalimantan Timur	1.132.3600
187	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	PT. Nusantara Berou Coal	Operasi Batubara dsp	SK.1020/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019	2/12/2019		Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	997.8900
188	SULAWESI TENGAH	Tambang	PT. Aneka Usaha Cemerlang	OP Nikel dmp	SK.1021/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019	2/12/2019	29/05/2022	Kab. Simalungun Provins. Sumatera Utara	21.1200
189	SUMATERA UTARA	Non Tambang	PT. Global Karai	Pembangunan PLTMH	SK.1025/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019	3/12/2019	22/11/2036	Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat	21.2000
190	JAWA BARAT	Non Tambang	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Tempat Pengolahan Kompos Sarimuki	SK.1028/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019	3/12/2019	20 tahun	Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	90.6100
191	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	CV Kumala Elam Mining	Operasi Batubara dsp	SK.1031/Menlhk/Setjen/Pla.0/12/2019	3/12/2019	25/11/2025	Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah	80.4800

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TGL SURAT	TANGGAL BERAKHIR IPPKH	LOKASI	LUAS
192	JAWA TENGAH	Non Tambang	PT.PLN (Persero)	Tasck Tower dan Hembangunan Jalur Transmisi saluren	SK.1032/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	3/12/2019	27/09/2046	Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah	904.6900
193	NUSA TENGGARA BARAT	Tambang	PT. Indotan Sumbawa Earat	OP Logam Emas dmp	SK.1040/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	6/12/2019	7/08/2034	Kab.Nganjuk Provinsi Jawa Timur	63.0000
194	JAWA TIMUR	Tambang	PT.Talenta Multi Kreasi	Pertambangan Pasir dan Tanah Urug (Bahan Galian C)	SK.1046/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	13/12/2019	19/02/2024	Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara	172.6100
195	NUSA TENGGARA BARAT	Tambang	PT. Indotan Lombok Barat Bangkit	OP galian emas dmp	SK.1048/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	13/12/2019	14/01/2039	Kab. Musra Enim Provnsi Sumatera Selatan	17.2000
196	SUMATERA UTARA	Tambang	SKK Mgas PT.Pertamina EP (KSO PT.Pertamina EP-PT.Petroenim Betun Solo)	Pengeboran Sumur Eksplorasi dan Fasilitas Penurjangnya	SK.1051/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	16/12/2019	17/09/2035	Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	2.9100
197	JAWA BARAT	Non Tambang	PT.PLN (Persero)	Penanggulangan Tower Kritis T.99 sampai dengan T.101	SK.1058/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	20/12/2019	27/09/2046	Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.1300
198	BANGKA BELITUNG	Tambang	PT. Addaya Buana Inler	Operasi Produksi Batu Granit dan Sarana Penurjangnya	SK.1069/Menhk/Setje n/Pla.0/12/2019	23/12/2019	11/05/2035	Kab.Fangkajene Provinsi Sulawesi Selatan	3.1100

REKAP DATA IPPKH TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	Penyelesaian	
		Keluar SK	Ditolak
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	198	35
2	IPPKH untuk Eksplorasi	43	2
3	Persetujuan untuk Survei	15	
4	Persetujuan Kerjasama	28	
5	Penetapan Areal Kerja	60	
6	Calon Lahan Kompensasi	8	
7	BAST Lahan Kompensasi	3	
JUMLAH		355	37
			392

DAFTAR IPPKH EKSPLORASI YANG TERBIT TAHUN 2019

NO	PROVINSI	TAMBANG / NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	TANGGAL BERAKHIR	KABUPATEN/KOTA	LOKASI	LUAS
1	SUMATERA SELATAN	Tambang	SKKMIGAS-Medco E&P Indonesia, PT	Eksplorasi Sumur Flamboyan-1 dan Akses Jalan	SK.1062/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2/2019	20/12/2019	20/12/2021	Kab. Musi Rawas	Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan	5.0900
2	JAMBI	Tambang	SKKMIGAS-Mont'or Oil Tungkal Ltd.	Eksplorasi Sumur Bekas-1 dan Jalan Akses	SK.1034/Menhk/Setjen/PLA.0/1/2/2019	03/12/2019	12/12/2021	Kab. Batanghari	Kab. Batanghari, Prov. Jambi	4.2000
3	BANTEN	Tambang	Alla Grantama, PT	Eksplorasi Batu Andesit	SK.37/Menhk/Setjen/Pla.0/1/2/019	17/01/2019	27/10/2020	Kab. Serang	Kab. Serang, Prov. Banten	114.4500
4	MALUKU	Tambang	PT. Antam Tbk (Blok Sangaji)	Pertambangan Nikel	SK.174/Menhk/Setjen/Pla.0/2/2/019	25/02/2019	25/02/2021	Kab. Halmahera	Kab. Halmahera Provinsi Maluku Utara	936.0900
5	SUMATERA SELATAN	Tambang	Baramuliana Prima, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.181/Menhk/Setjen/Pla.0/2/2/019	27/02/2019	27/02/2021	Kab. Mus Banyuasin	Kab. Mus Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	756.6200
6	KALIMANTAN UTARA	Tambang	Pesona Khatulistiwa Nusantara, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.186/Menhk/Setjen/Pla.0/2/2/019	28/02/2019	28/02/2021	Kab. Bulungan	Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	4.080.0000
7	PAPUA	Tambang	Antam Tbk., PT	Eksplorasi Emas Dmp.	SK.128/Menhk/Setjen/Pla.0/2/2/019	11/02/2019	23/08/2024	Kab. Pegunungan Bintang	Kab. Pegunungan Bintang, Prov. Papua	2.974.1800
8	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Batu Damai Sejahtera, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.233/Menhk/Setjen/Pla.0/3/2/019	20/03/2019	20/03/2021	Kab. Kapuas	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	900.6000
9	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Adaro Indonesia, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.267/Menhk/Setjen/Pla.0/4/2/019	05/04/2019	05/04/2021	Kab. Tabalong dan Kab. Balangan	Kab. Tabalong dan Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan	480.8500
10	KALIMANTAN UTARA	Tambang	Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT	Survey Geoteknik Tanah	S.467/Menhk-PKTL/REN/PLA.0/5/2019	10/05/2019	10/05/2020	Kab. Bulungan	Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	1.5000
11	MALUKU UTARA	Tambang	Nusa Halmahera Minerals, PT	Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Bahan Galian Emas	SK.352/Menhk/Setjen/Pla.0/5/2/019	21.05.2019	21.05.2021	Kab. Halmahera Utara	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	8.566.5600
12	JAMBI	Tambang	SKK Migas -Talisman East Jabung B.V. (Pan Orient Energy East Jabung Pte.)	Pemboran Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Anggun-1, Elok-1/Ayu-1, Cantik-1 dan Benu-1 dan Pembangunan Jalan	SK.191/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2/019	28/02/2019	20/01/2023	Kab. Muaro Jambi	Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi	97.9500
13	JAWA TIMUR	Tambang	Unmine Indonesia, PT	Eksplorasi Penambangan Batu Gamping	SK.227/Menhk/Setjen/Pla.0/3/2/019	15/03/2019	27/03/2021	Kab. Tuban	Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	175.8600
14	SUMATERA SELATAN	Tambang	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Seismik 2D, Pemboran Eksplorasi dan Akses Jalan	SK.526/Menhk/Setjen/Pla.0/6/2/019	07/06/2019	07/08/2021	Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	43.6300
15	SUMATERA SELATAN	Tambang	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Pengeboran Sumur Eksplorasi Sekar Wangi (SWI-1) dan Akses Jalan	SK.513/Menhk/Setjen/PLA.0/8/2/019	02/08/2019	24/07/2021	Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	5.5800
16	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Tanur Jaya, PT	Eksplorasi Batubara	SK.183/Menhk/Setjen/PLA.0/2/2/019	27/02/2019	05/03/2020	Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	3.891.9400
17	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Antam Tbk., PT	Eksplorasi Lanjutan Nikel	SK.104/Menhk/Setjen/Pla.0/1/2/019	31/01/2019	24/06/2020	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	36.6000

NO	PROVINSI	TAMBANG / NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	TANGGAL BERAKHIR	KABUPATEN/OTA	LOKASI	LUAS
18	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Antam Tbk., PT	Eksplorasi Lanjutan Nikel	SK.139/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019	13/02/2019	13/02/2021	Kab. Kolaka	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	123.9500
19	PAPUA	Tambang	Papua Fajar Timur, PT	Eksplorasi Emas	SK.282/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019	10/04/2019	22/07/2019	Kab. Mimika	Kab. Mimika, Prov. Papua	9.114.5700
20	JAMBI	Tambang	SKKMIGAS-Selbraya Merangin Dua, PT	Eksplorasi Pembaruan Sumur Belato-2 Dan Akses Jalan	SK.407/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2019	28/06/2019	28/06/2021	Kab. Sarolangun	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	20.7200
21	PAPUA	Tambang	Papua Pusaka Nusantara, PT	Eksplorasi Emas	SK.342/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019	14/05/2019	22/07/2019	Kab. Mimika	Kab. Mimika, Prov. Papua	17.295.7400
22	NUSA TENGGARA BARAT	Tambang	Selatan Arc Minerals, PT	Eksplorasi Emas	SK.368/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019	28/05/2019	17/12/2019	Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	955.0000
23	BANTEN	Non Tambang	Sintesa Banten Geothermal, PT	Eksplorasi Panas Bumi	SK.484/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	24/07/2019	27/04/2020	Kab. Serang	Kab. Serang, Prov. Banten	7.9500
24	JAWA BARAT	Tambang	SKKMIGAS-Pertamina EP, PT	Eksplorasi Pembaruan Sumur Handu Wangi (RWG-001)	SK.481/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019	24/07/2019	24/07/2021	Kab. Indramayu	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	2.4500
25	NUSA TENGGARA BARAT	Non Tambang	UPC Lombok Timur Bayu Energi	Survey Potensi Sumber Daya Angin dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (P.LTB)	S.667/MerLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	01/07/2019	01/07/2020	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat	12.8400
26	NUSA TENGGARA TIMUR	Non Tambang	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Eksplorasi Panas Bumi Wae Sano	SK.546/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019	14/08/2019	14/08/2024	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur	2.5000
27	JAWA TIMUR	Tambang	Damai Suksesindo, PT	Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya	SK.859/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019	30/08/2019	25/01/2022	Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	1.263.4796
28	RIAU	Tambang	SKKMIGAS - Pertamina Hulu Energi Siak, PT	Survey Seismik 2D Area-3	S.1104/Menlhk-PKTL/REN/P.A.0/9/2019	10/09/2019	10/09/2020	Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis	Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis, Prov. Riau	21.503.0000
29	RIAU	Tambang	SKKMIGAS - EMP Buntu Ltd	Survey Seismik 2D dan 3D Pada Wilayah Kerja Buntu	S.1180/Menlhk-PKTL/REN/P.A.0/9/2019	24/09/2019	24/09/2020	Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan	Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan, Prov. Riau	10.591.0000
30	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Asmin Bara Bronang, PT	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.718/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019	23/09/2019	23/09/2021	Kab. Kapuas	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	1.352.9300
31	KALIMANTAN UTARA	Tambang	Rapak Anugerah Prima Coai, PT	Eksplorasi Batubara	SK.774/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019	08/10/2019	19/04/2020	Kab. Bulungan	Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara	4.400.3100
32	JAWA TIMUR	Tambang	Bumi Suksesindo, PT	Eksplorasi Lanjutan Emas Dan Mineral Pengikutnya	SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019	16/10/2019	16/10/2021	Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	3.350.7000
33	JAWA TIMUR	Tambang	Pendawa Lestari Perkasa, PT	Eksplorasi Batu Andesit (Galian C)	SK.784/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019	10/10/2019	27/03/2021	Kab. Pasuruan	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	52.6100
34	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Damar Jaya Utama, PT	Survey Potensi Sumber Daya Angin dalam rangka Penyusunan Dokumen AMDAL	SK.1356/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/10/2019	24/10/2019	24/10/2020	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Padang Lawas Utara, Prov. Sumatera Utara	5.110.7196

NO	PROVINSI	TAMBANG / NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	TANGGAL BERAKHIR	KABUPATEN/KOTA	LOKASI	LUAS
35	SUMATERA UTARA	Tambang	Agincourt Resources, PT	Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya	SK.796/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	15/10/2019	15/10/2021	Kab. Mandailing Nata	Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	19.236.0000
36	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Giga Putra Kueni, PT	Eksplorasi Batuan	SK.895/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	18/10/2019	03/11/2020	Kab. Paser	Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	184.3400
37	RIAU	Tambang	SKKMIGAS - EMP Malacca Strait S.A	Eksplorasi Pemboran Sumur MSTQ-01 Dan Akses Jalan	SK.855/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	16/10/2019	16/10/2021	Kab. Kepulauan Meranti	Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau	31.6300
38	NUSA TENGGARA BARAT	Tambang	Sumbawa Jutaraya, PT	Eksplorasi Lanjutan Emas Dan Mineral Pengikutnya	SK.911/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	16/10/2019	16/10/2021	Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	2.842.4400
39	SUMATERA SELATAN	Tambang	SKKMIGAS - Medco E&P Indonesia, PT	Eksplorasi Pemboran Sumur Rambutan Deep-2, Rambutan Deep-3, Dan Akses Jalan Masuk	SK.927/Menhk/Setjen/PLA.0/10/2019	16/10/2019	16/10/2021	Kab. Muara Enim	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	11.0300
40	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Pati Coal, PT	Eksplorasi Batubara	SK.1006/Menhk/Setjen/PLA.0/11/2019	22/11/2019	17/04/2021	Kab. Mahakam Ulu	Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kalimantan Timur	8.260.3200
41	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	PT. Persada Makmur Sejahtera	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.1066/Menhk/Setjen/PLA.0/12/2019	23/12/2019	23/12/2021	Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	4.269.5000
42	SUMATERA BARAT	Tambang	PT. Hiday Daya Energy	Panas Bumi (Geothermal)	SK.1045/Menhk/Setjen/PLA.0/12/2019	13/12/2019	13/12/2021	Kab. Sook	Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat	679.0000
43	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	PT. Persada Makmur Selaras	Eksplorasi Lanjutan Batubara	SK.1067/Menhk/Setjen/PLA.0/12/2019	23/12/2019	23/12/2021	Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	2.258.0700

DAFTAR IZIN KERJASAMA YANG TERBIT TAHUN 2019

NO	PENGGUNA	KERJASAMA	GUNA	KEGUNAAN	NO. SURAT (S... /Menhut.VII)/...)	TAHUN	TANGGAL	LOKASI	LUAS
1	PT. Musi Hutan Persada dan SKK Migas PT. Medco E and P Indonesia	Perum Perhutani	Jalan/Alur	Peningkatan Jalan Bersama	S.22/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	2019	14/1/2019	Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	46.57
2	CV. Bumi Usaha Maju	Perum Perhutani	Jalan/Alur	Jalan Angkut Hasil Produksi Pasir (Galian C)	S.20/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	2019	14/1/2019	Kab. Subang Provinsi Jawa Barat	2.0527
3	Pemerintah Kab Elora	Perum Perhutani	Jalan/Alur	Jalan Peghubung Antar Desa	47/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	2019	18/1/2019	Kab. Subang Provinsi Jawa Barat	61.8737
4	Pemerintah Kab Rombang	Perum Perhutani	Jalan/Alur	Jalan Peghubung Antar Desa Kajar dan Desa Pasucean	61/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	2019	22/1/2019	Kab. Rombang Provinsi Jawa Tengah	1.5122
5	Pemerintah Kab. Semarang	Perum Perhutani	Jalan/Alur	Alu/Jalan untuk Jalan Peghubung	61/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	2019	24/1/2019	Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah	0.5504
6	Dinas PU dan Kawasan Pemukiman	Perum Perhutani	Embung	Pembangunan Embung Comoro	S.163/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2019	2019	26/2/2019	Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah	0.2589
7	Pemerintah Desa Nanjungwang: Pada Wilayah Kerja KPH Sumedang	Perum Perhutani	Jalan/Alur	Jalan Umum	S.226/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2019	2019	43772	Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	19911,59 M2
8	PT.PLN (Persero)	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Listrik	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Wilayah Sulsel - Sulra Sulbar Area Pinrang	S.374/MenLHK-PKTL/REN/PLA.C/3/2019	2019	26/3/2019	Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	2.38
9	PT.PLN (Persero)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	Listrik	Jaringan Transmisi SUTT 150 KV Sidikalang-Subulussalam melintasi Kawasan Tahura	S.334/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2019	2019	43651	Kota Subulussalam Provinsi Aceh	?
10	PT.PLN (Persero)	Cut Nyak Dien	Listrik	Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 275 KV Sigli-Ulee Kareng Melintasi Tahura	ND.186/KSDAE/PIP/				
11	PT.PLN (Persero)	Dirjen KSDAE	Listrik	SUTET 275 KV Sigli-Ulee Kareng Melintasi Kawasan TAHURA	S.186/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2019	2019	20/6/2019	Cut Nyak Dien Provinsi Aceh	30.225
12	PT. Telekomunikasi Selular (Side Mallawa)	KPHP Unit VIII	Telekomunikasi	Pembangunan Menara telekomunikasi selular	S.673/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2019	2019	43503	Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan	0.0484
13	PT. Pertamina EP Cepu	Perum Perhutani	Minyak dan Gas	Mobilisasi Peralatan Berat Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi	S.676/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019 tanggal 03 Juli 2019	2019	43531	Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur	3.54
14	PT. PLN (Persero)	UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis	Listrik	Jalur Listrik Masuk Desa (bukan SUTT/SUTET)	S.187/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2019 tanggal 29 Juli 2019	2019	29/7/2019	Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2.9

NO	PENGGUNA	KERJASAMA	GUNA	KEGUNAAN	NO. SURAT (S.../Menhut-VII)/...	TAHUN	TANGGAL	LOKASI	LUAS
15	PT.PLN (Persero)	Perum Perhutani	Listrik	Pemasangan Jalur Listrik Masuk Desa	S.824/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 24 Mei 2019	2019	24/5/2019	Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	0.18
16	PT. Batu Kali Welang Ampuh	Perum Perhutani	Alur/Jalan	Jalan Angkutan Hasil Produksi	S.855/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/0/2019 tanggal 07 Agustus 2019	2019	43654	Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur	0.37
17	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani	Alur/Jalan	Peningkatan kualitas jalan menuju puncak Telomoyo	S.1051/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 07 Agustus 2019	2019	29/8/2019	Kab Magelang Provinsi Jawa Tengah	1.18
18	PT.PLN (Persero)	Perum Perhutani	Listrik	Pemasangan Jaringan Listrik	S.1049/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019	2019	29/8/2019	Kab.Grobogan Provinsi Jawa Tengah	0.37
19	Sdr.Sukim	Perum Perhutani	Alur/Jalan	Angkutan Hasil Produksi	S.1048/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019	2019	29/8/2019	Kab.Pemalang Provinsi Jawa Tengah	0.4
20	PT. Partogi Hidro Energi	Kepala UPT KP11 Unit XII Tarutung	Alur/Jalan	Peningkatan kualitas jalan menuju lokasi pembangunan AEK Sibudong	S.1205/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019	2019	27/9/2019	Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	187
21	PDAB.Tirta Utama	Perum Perhutani	Air	Jaringan Transmisi Air Baku Sistem Penyedia Air Minum	S.1269/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019	2019	43779	Kab. Wonogiri Provinsi Jawa Tengah	0,08
22	Komando Pembinaan Doktrin	Perum Perhutani	Listrik	Pembangunan Tower Radio	S.1358/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019	2019	24/10/2019	Kab. Malang Provinsi Jawa Timur	0,01
23	PT.Pertamina EP	Perum Perhutani	Alur/Jalan	Pemasangan Pipa	S.1236/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 05 Oktober 2019	2019	15/10/2019	Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat	0,25
24	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	UPTD KP11 Pasaman Barat	Listrik	PLTMH Rotan Cetah	S.1287/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019	2019	15/10/2019	Kab. Pasaman Provinsi Sumatera Barat	0,59
25	Pemerintah Kabupaten Ngarjuk	Perum Perhutani	Alur/Jalan	Jalan Antar Borrow Area dan Quarry Area Pembangunan Bendungan Semantok	S.1264/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019	2019	43718	Kab.Nganjuk Provinsi Jawa Timur	11,07
26	Mentesi LHK	Perum Perhutani	Air	Penampungan Bak Penampung air	S.1134/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2019 tanggal 16 September 2019	2019	16/09/2019	Kab.Trenggalek Provinsi Jawa Timur	4.6697
27	PT.Rekayasa Industri-JGC Corporation-JGC Indonesia	Perum Perhutani	Listrik	Pemasangan Jaringan Listrik Tegangan 20 KV	S.1445/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019 tanggal 08 November 2019	2019	43688	Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur	3,90
28	Bala: Besar Wilayah Sungai (BWS)Pemali Juana	Perum Perhutani	Jalan	Jalan Akses Pembangunan Bendungan Randugunting	S.1842/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019 tanggal 28 November 2019	2019	28/11/2019	Kab.Blora, Provinsi Jawa Tengah	2,78

PENETAPAN AREAL KERJA IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN S/D TAHUN 2019

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT PENETAPAN AREAL KERJA	TGL SURAT	LUAS PENETAPAN AREAL
1	SULAWESI SELATAN	Non Tambang	UPC Sidrap Bayu Energi, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	SK.97MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	11 Januari 2019	47.97
2	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Bhumi Rantau Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.531MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019	24 Januari 2019	99.62
3	JAWA BARAT	Tambang	Ponpes Al-Hikmah	OP. Batu Alam dan Trass (Galian C)	1255/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/2/2019	02 Desember 2019	9.1
4	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	PT. Sebuku Iron Lateritic Ores	Pertambangan Bijih Besi dan Mineral Pengikutnya	1321/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/2/2019	14 Februari 2019	1755
5	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	PT. Bara Tabang	Operasi Produksi batubara	1338/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/2/2019	21 Februari 2019	998.09
6	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	PT. Berkat Bumi Persada	Operasi Produksi batubara	1598/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/3/2019	04 Maret 2019	277.6
7	SULAWESI TENGAH	Tambang	Hengjaya Mineralindo, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	1460/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/2/2019	27 Februari 2019	994.22
8	KALIMANTAN UTARA	Tambang	PT.Mitrabara Adiperdana	Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya	1681/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/3/2019	11 Maret 2019	100.85
9	SUMATERA SELATAN	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Tegangan Ekstra Tinggi 500 Kv Wilayah	1714/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/3/2019	12 Maret 2019	208.7218
10	SULAWESI SELATAN	Tambang	PT. Celebes Bangun Jaya	OP. Batu Gamping	SK.4188/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/4/2019	29 April 2019	112.47
11	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	PT. Maruai Coal	Op. Batubara dsp	SK.4183/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/4/2019	29 April 2019	5250.93
12	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Pelita Jaya Prima, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.4187/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/4/2015	29 April 2019	349.6
13	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Bhumi Rantau Energi, PT	Sarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Batubara	SK.5230/Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/5/2019	29 Mei 2019	40.54
14	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Sungai Danau Jaya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5335Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/5/2019	31 Mei 2019	16.68
15	KALIMANTAN UTARA	Tambang	PT. Anjas Anita Jaya	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5332Menlkh-PKTL/REN/PLA.0/5/2019	31 Mei 2019	1500.73

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PEMILIK	KFGUNAAN	NO_SURAT PENETAPAN AREAL KERJA	TGL SURAT	LUAS PENETAPAN AREAL
16	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Kalimantan Sejahtera Mandiri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5505/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2019	14 Juni 2019	991.81
17	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Citra Dayak Indah, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.5333/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/5/2019	31 Mei 2019	649.75
18	BANGKA BELITUNG	Non Tambang	Wallie Tampas Citratama, PT	Pembangunan Dermaga Khusus Pertambangan Pasir Kwarsa	SK.6114/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	01 Juli 2019	12.29
19	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Sumber Permata Hitam, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.6195/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	09 Juli 2019	343.9
20	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Multi Tambangjaya Utama, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.6104/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	01 Juli 2019	3052.57
21	SULAWESI TENGAH	Tambang	Indoberkah Jaya Mandiri, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.6392/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	23 Juli 2019	185.11
22	SULAWESI TENGAH	Tambang	Ceria Nugrahe Indotama, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.6261/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	12 Juli 2019	332
23	MALUKU UTARA	Tambang	Bintani Megahindah, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.6509/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	29 Juli 2019	780.31
24	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Berkat Bumi Persada, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.6660/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/8/2019	29 Juli 2019	363.95
25	SUMATERA UTARA	Tambang	Bara Sumatera Energi, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.6690/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/8/2019	16 Agustus 2019	322.94
26	JAWA TIMUR	Non Tambang	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Bendungan Semantok dan Sarana penunjangnya	SK.6702/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/8/2019	09 Agustus 2019	428.17
27	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	Sarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Batubara	SK.6415/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	26 Juli 2019	600.01
28	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Anugerah Lumbang Energi, PT	Operasi Produksi Batubara	SK.6106/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/7/2019	01 Juli 2019	14.75
29	SUMATERA BARAT	Non Tambang	(pemerintah kab solok) Bupati Solok	Pembangunan Jalan Jalur Kapsujan - Rimbo Dada dan Jalur	SK.7369/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2019	09 September 2019	13.229
30	MALUKU UTARA	Tambang	Al Gifari Wilidan Sejahtera, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.7286/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2019	06 September 2019	341.27
31	SUMATERA BARAT	Non Tambang	PLN (Persero), PT	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Tapak Tower Ortblin - Kliranjao	SK.7104/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/8/2019	28 Agustus 2019	12.25

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT PENETAPAN AREAL KERJA	TGL SURAT	LUAS PENETAPAN AREAL
32	SULAWESI TENGGARA	Tambang	PT. Tonia Mitra Sejahtera	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.7431//MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2019	12 September 2019	12,25
33	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	PT. Borneo Indobara	Op. Batubara dsp	SK.7478//MENLHK-PKTL/REN PLA.0/9/2019	16 September 2019	992,91
34	LAMPUNG	Tambang	Tanggamus Electric Power, PT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2 x 28 MW dan Jalur Transmisi	SK.7473//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2019	16 September 2019	94,56
35	MALUKU UTARA	Tambang	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.7299//MENLHK-PKTL/REN/OTL.C/9/2019	06 September 2019	763,18
36	SULAWESI TENGGARA	Tambang	Pernick Sultra, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.7696//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2019	23 September 2019	90,83
37	JAWA BARAT	Tambang	Trimahesa Cakrawala, PT	Operasi Produksi Batu Andesit (Galian C)	SK.8094//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/9/2019	23 September 2019	90,83
38	SULAWESI TENGAH	Tambang	BintangDelapan Mineral (Blok V), PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.8413//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/10/2019	07 Oktober 2019	62,80
39	RIAU	Tambang	SKKMIGAS-Badan Operasi Bersama PT. Bumi Sak Pusako-Pertamina Hulu	Reaktivasi Sumur Tua Minyak dan Gas (Eksisting) dan Sarana Penunjangnya	SK.9803//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2019	27 Nopember 2019	340,42
40	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Jembayan Muarabara, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.9863//MENLHK-PKTL/REN/OTL.C/12/2019	04 Desember 2019	297,79
41	BANGKA BELTUNG	Tambang	Bumi Billiton Raya, PT	Operasi Produksi Pasir Kwarsa dan Sarana Penunjangnya	SK.9811//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2019	28 Nopember 2019	18,64
42	MALUKU UTARA	Tambang	Adidaya Tangguh, PT	Operasi Produksi Bijih Besi dan Sarana Penunjangnya	SK.9469//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2019	08 Nopember 2019	4,75
43	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Alam Bahtera Bar to Raya, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.9444//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2019	08 Nopember 2019	459,44
44	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	Eksplorasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.9883//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/12/2019	04 Desember 2019	99,62
45	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Bhumi Rantau Energi, PT	Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjang	SK.9812//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/11/2019	28 Nopember 2019	634,95
46	KALIMANTAN SELATAN	Tambang	Transcoal Minergy, PT	Operasi Produksi Tambang Bawah Tanah Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.10229//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/12/2019	19 Desember 2019	124,22
47	KALIMANTAN TENGAH	Tambang	Kara Emas Madeneri, PT	Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya	SK.10226//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/12/2019	19 Desember 2019	119,07

NO	PROVINSI	TAMBANG/ NON TAMBANG	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO_SURAT PENETAPAN AREAL KERJA	TGL SURAT	LUAS PENETAPAN AREAL
48	KALIMANTAN TIMUR	Tambang	Rencana Mulia Barutama, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.10434//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/12/2019	26 Desember 2019	76,43
49	RIAU	Non Tambang	PT.Hutama karya	Pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai	SK.10246//MENLHK-PKTL/REN/OTL.0/12/2019	20 Desember 2019	133,74
50	MALUT	Tambang	Mineral Trobos, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.7476/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2019	16 September 2019	50.59
51	SULTRA	Tambang	Makmur Lestari Primata, PT	Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.8414/Menlhk-PKTL/REN/Pla.0/10/2019	07 Oktober 2019	402.48
52	GORONTALO	Tambang	Puncak Emas Tani Sejahtera, PT	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	SK.8753/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/10/2019	11 Oktober 2019	93.7
53	KALBAR	Non Tambang	Ichiko Agro Lestari, PT	Pembangunan Jalan Pengangkutan Hasil Produksi Perkebunan	SK.8952/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/10/2019	21 Oktober 2019	2.5188
54	KALTIM	Tambang	Kideco Jaya Agung, PT (Tambang Batubara Bukit Asam, PT)	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.9316/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019	04 Nopember 2019	11974.78
55	KALSEL	Tambang	Antang Gunung Meratus, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.9347/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/11/2019	05 Nopember 2019	258.45
56	RIAU	Tambang	SKKMIGAS-Badan Operasi Bersama Bumi Siak Pusako PT - Pertamina Hulu	Reaktivasi Sumur Minyak dan Gas Bumi (Eksisting)	SK.9477/Menlhk-PKTL/REN/Pla.0/11/2019	08 Nopember 2019	174.73
57	KALSEL	Tambang	Eternal Richway, PT	Operasi Produksi Batu Gamping dan sarana penunjangnya	SK.9443/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2019	08 Nopember 2019	89.8
58	SULTENG	Tambang	Penta Dharma Karsa, PT	Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya	SK.9618/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/11/2019	14 Nopember 2019	440.91
59	SUMATERA UTARA	Tambang	Scrikmas Mining, PT	Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya	SK.9620/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/11/2019	15 Nopember 2019	484.512
60	SUMATERA UTARA	Non Tambang	Kementerian Pertahanan RI	Pembangunan Lapangan Tembak Senjata Berat Artileri Medan Tentara Nasional	SK.10708/Menlhk-PKTL/Ren/Pla.0/12/2019	31 Desember 2019	9.9938

DAFTAR PERSETUJUAN CALON LAHAN KOMPENSASI S/D TAHUN 2019

NO	PROVINSI	TAMBANG / NON TAMBANG	PENGGUNA	GUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	NO SURAT PP / SK MENHUT	TGL SURAT PP / SK MENHUT	LOKASI	LUAS LAHAN KOMPENSASI
1	JAWA BARAT	Tambang	PT. Trimahesa Cakrawala	Galian C	OP. Batu Andesit	S.687/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/7/2019	08 Juli 2019	69/1/IPPKH/PMDN/2017	03 Juli 2017	Desa Pasir Jambu Kec. Maris Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat	21.42
2	JAWA TENGAH	Non Tambang	PT. PLN (Persero)	Kelistrikan	Pembangunan Jaringan SUTT 150 KV	S.483/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/5/2019	14 Mei 2019	17/1/IPPKH-PB/PMDN/2017	03 Juli 2017	Desa Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah	31.69
3	JAWA BARAT	Tambang	CV. Kibar Sarimukti	Galian C	Kegiatan Penambangan Batu Gamping	S.346/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/8/2019	06 Agustus 2019	26/1/IPPKH/PMDN/2018	27/04/2018	Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat	19.80
4	JAWA BARAT	Tambang	PT. Jawa Satu Power	Kelistrikan	Pembangunan PLTGU Jawa 1 dsp	S.1423/MenLHK-PKTL/REN/LA.0/11/2019	04/11/2019	S.1410/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/11/2018	04/11/2019	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	32.00
5	JAWA TIMUR	Tambang	PT. Agung Satrya Abadi	Sirtu	Operasi Produksi Sirtu dsp	239/ASA/IPPKH/IV/2019	22/04/2019	S.1111/MenLHK-PKTI/REN/PLA.0/9/2019	12/09/2019	Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur	15.03
6	JAWA BARAT	Tambang	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)	Migas	Jalur Pipa SSWJ dsp	S.1202/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/09/2019	27/09/2019	3/1/IPPKH/PMDN/2018	17 Januari 2018	Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat	11,667.00
7	JAWA BARAT	Non Tambang	PT. Pertamina Geothermal Energy	Panas Bumi	Eksploitasi Panas Bumi	S.1608/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/12/2019	19/12/2019	SK.500/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2018	14/11/2018	Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat	18,63
8	LAMPUNG	Tambang	PT. Natarang Mining	Mineral Logam Lain	OP. Emas, Perak dsp	S.1537/MeLHK-PKTL/REN.PLA.0/11/2019	27/11/2019	SK.353/MENLHK/SETJN/PLA.0/5/2019	24 Mei 2019	Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung	100.40

DAFTAR BAST LAHAN KOMPENSASI S/D TAHUN 2019

NO	PROVINSI	PENGGUNA	KEGUNAAN	NO SURAT	TANGGAL	LUAS LAHAN KOMPENSASI	BERITA SERAH TERIMA LAHAN KOMPENSASI	TANGGAL BERITA SERAH TERIMA LAHAN KOMPENSASI	LOKASI
1	JAWA BARAT	CV.An-Nakhl	Operasi Produksi Batu Alam dan Trass	84/1/PPKH/PMDN/2017	02 Agustus 2017	18.09	BA.3/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/1/2019	14 Januari 2019	Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
							01/CV.AnN/I/2019		
2	LAMPUNG	PT.Tanggamus Electric Power	PLTA 2 X 28 MW dan Jalur Transmisi 150 KV	2/1/IPPKH-PB/PMA/2017	17 Januari 2017	189.720	BA.84/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/4/2019	10 April 2019	Kab. Tanggamus Provinsi Lampung
							IEP-35-19-130-0117		
3	JAWA BARAT	PT.Trimahesa	Operasi Produksi batu Andesit (Galian C)	69/1/IPPKH/PMDN/2017	03 Juli 2017	21.42	BA.182/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/8/2019	22 Agustus 2019	Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat
							1.602/DIR-TC/VIII/2019		

